

**ANALISIS VARIABEL KEWILAYAHAN DAN TINGKAT
AKSESIBILITAS PERBANKAN TERHADAP INKLUSI
KEUANGAN REGIONAL INDONESIA**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Irma Asyatun

145020400111012

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Meraih Gelar Sarjana Ekonomi**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

"Analisis Variabel Kewilayahan dan Tingkat Aksesibilitas Perbankan
Terhadap Inklusi Keuangan Regional Indonesia "

Yang disusun oleh :

Nama : Irma Asyatun
NIM : 145020400111012
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Ekonomi, Keuangan dan Perbankan

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal **17 April 2018** dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Prof. Dr. Munawar , SE., DEA.
NIP. 19570212 198403 1 003
(Dosen Pembimbing)
2. Setyo Tri Wahyudi, SE.,M.,Ec.,PhD.
NIP. 19810702 200501 1 002
(Dosen Penguji I)
3. Moh. Athoillah, SE., ME.
NIP. 201605 841121 1 001
(Dosen Penguji II)

Malang, 24 April 2018
Ketua
Program Studi,

Setyo Tri Wahyudi, SE.,M.,Ec.,PhD.
NIP. 19810702 200501 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Irma asyatun
Tempat, tanggal lahir : Bima, 11 oktober 1996
NIM : 145020400111012
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Ekonomi, Keuangan dan Perbankan
Alamat : Jalan Candi 2a Klaseman Kota Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :
"Analisis Variabel Kewilayahan Dan Tingkat Aksesibilitas Perbankan Terhadap
Inklusi Keuangan Regional Indonesia"

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Munawar, SE., DEA
NIP. 195702121984031003

Malang, 9 April 2018

Yang membuat pernyataan,

MATERAI
TEMPEL
68039AEF997868941

6000
ENAM RIBU RUPIAH

irma Asyatun
NIM. 145020400111012

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Setyo Tri Wahyudi, SE., M.Ec., Ph.D.
NIP. 19810702 200501 1 002

RIWAYAT HIDUP

Nama : Irma Asyatun

Tempat, Tanggal Lahir : Bima, 11 Oktober 1996

Nim : 145020400111012

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Konsentrasi : Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan

Alamat : Jl. Candi Blok 2a Klaseman Kota Malang

Riwayat Pendidikan

1. Tk Nuruh Huda 2000-2002
2. Sdn Reo 1 2002-2008
3. Mtsn Reo 2008-2010
4. Smpn 02 Kota Bima 2010-2011
5. Sman 01 Kota Bima 2011-2014
6. Si Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya 2014-2018

Pengalaman Organisasi

1. Staf Magang Hmjie 2014
2. Organisasi Luar Kampus : Anggota World Merrit Lokal Chapter Malang 2016

Pengalaman Kepanitiaan

Panitia Staf Liasion Officer Economics Sport And Talent Brawijaya 2015

Analisis Variabel Kewilayahan Dan Tingkat Aksesibilitas Perbankan Terhadap Inklusi Keuangan Regional Indonesia

Irma Asyatun

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email : irmaasyatun@gmail.com

Abstrak

Inklusi keuangan menjadi topik hangat yang bicarakan secara global terkait diterapkannya prioritas kebijakan banyak negara yang mengarah pada peningkatan inklusi keuangan untuk mengurangi masalah kemiskinan dan ketimpangan di suatu negara. Artikel ini berusaha mengidentifikasi apakah variabel kewilayahan yaitu tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan, ketimpangan pendapatan, jumlah populasi dewasa dan tingkat aksesibilitas perbankan signifikan mempengaruhi inklusi keuangan di Indonesia. penelitian ini memproksikan tingkat inklusi keuangan dengan menghitung nilai indeks inklusi keuangan menggunakan metode yang dikembangkan oleh Sarma pada tahun 2012. Periode penelitian dilakukan dari tahun 2012 hingga 2015. Dengan menggunakan metode estimasi panel data, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan dan tingkat aksesibilitas perbankan signifikan positif mempengaruhi inklusi keuangan di Wilayah Regional Indonesia. Sedangkan tingkat ketimpangan pendapatan dan jumlah populasi dewasa tidak signifikan mempengaruhi inklusi keuangan di Wilayah Regional Indonesia.

Kata Kunci: Inklusi Keuangan, Indeks Inklusi Keuangan, Aksesibilitas Perbankan

Abstract

Financial inclusion has been new issue that globally was talked about the priority policy in many country to developed financial inclusion to reduce poverty and income inequality. This paper try to identification relationship between financial inclusion and regional variables as; level of income, level of education, income inequality, total adult population and banking accessibility level variables, was significant influence the level of regional financial inclusion in Indonesian. To proxy the level of financial inclusion, In this research count the value of financial inclusion index using method that was developed by Sarma(2012). Research time in this paper was begun from 2012 until 2015. Using panel data estimate, we found the result show that level of income, level of education and banking accessibility level significantly increase the level of financial inclusion in regional Indonesian. While income inequality and total adult population not significantly influence financial inclusion in regional Indonesian.

Keywords: financial inclusion, indeks of financial inclusion, banking accessibility

KATA PENGANTAR

Puji syukur pertama-tama saya panjatkan kepada ALLAH swt. Yang telah memberikan nikmat kesehatan, iman dan taqwa, Karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulisan dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Variabel Kewilayahan dan Tingkat Aksesibilitas Perbankan Terhadap Inklusi Keuangan Regional Indonesia.

Penyusunan skripsi ini di tujukan untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai derajat Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Dalam skripsi ini pokok-pokok bahasan yang disajikan meliputi latar belakang penelitian terkait inklusi keuangan di regional Indonesia, tinjauan pustaka terkait konsep inklusi keuangan dan penelitian-penelitian terdahulu, kemudian terdapat bab metode penelitian serta pembahasan dan kesimpulan dari hasil penelitian terkait inklusi keuangan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof, Munawar Ismail, SE., DEA selaku dosen pembimbing penulisan skripsi
2. Bapak Setyo Tri Wahyudi, SE., M.Ec., PhD selaku Ketua Program Studi Ekonomi keuangan dan perbankan
3. Bapak Dr. rer.pol. Wildan Syafitri, SE., ME., selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
4. Bapak Nurkholis, SE., M.Bus.(Acc.), Ak, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya.

5. Kepada kedua orang tua yang selalu mendoakan dan mensupport segala kebutuhan penulis, memotivasi dan segala kasih sayang yang turut memperlancar penyelesaian skripsi penulis
6. Teman-teman kuliah “ GENG GINCU” yang sangat-sangat membantu dan setia menemani kala suka dan duka selama masa perkuliahan, Teman-Teman SMAN 01 Kota Bima (Syawalistianah, Mutia Nurul Syahrani, Nitya Anugrah) yang sudah sangat membantu dalam memotivasi dan menghibur penulis selama ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. Sekian dan terimakasih wassalamu'alaikum wr.wb.

Malang, 17 April 2018

Irma Asyatun

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 12
2.1 Telaah Inklusi Keuangan	12
2.1.1 Konsep Inklusi Keuangan	12
2.1.2 Indikator Inklusi Keuangan	17
2.1.3 Pengukuran Indeks Inklusi Keuangan	22
2.2 Penelitian Terdahulu	28
2.3 Kerangka Pikir	36
2.4 Hipotesis	38
 BAB III METODE PENELITIAN	 39
3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Variabel Penelitian, Definisi Operasional dan Sumber Data	39
3.3 Lingkup Penelitian	42
3.4 Teknik Analisis Data	43
3.4.1 Perhitungan Indeks Inklusi Keuangan	43
3.4.2 Model Analisis	47
3.4.3 Pengujian Asumsi Klasik	49
3.4.4 Pengujian Data Panel	51

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Hasil	56
4.1.1 Hasil Perhitungan Indeks Inklusi Keuangan	57
4.1.2 Hasil Uji Pemilihan Model Terbaik	63
4.1.3 Hasil Pengujian Asumsi Klasik	64
4.1.4 Hasil Uji Statistik Data Panel	66
4.2 Pengujian Hipotesis.....	68
4.3 Pembahasan	72
4.4 Implikasi Penelitian.....	85
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 88
5.1 Kesimpulan	88
5.2 Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Leyshon dan Thrift (1995) menjelaskan bahwa inklusi keuangan merupakan antitesis dari eksklusi keuangan. Proses eksklusi keuangan membuat masyarakat miskin tidak dapat mengakses manfaat dari sektor keuangan dan memberikan kerugian kepada masyarakat yang tidak mendapatkan layanan sistem keuangan dikarenakan kurangnya akses, jaminan, riwayat kredit dll.

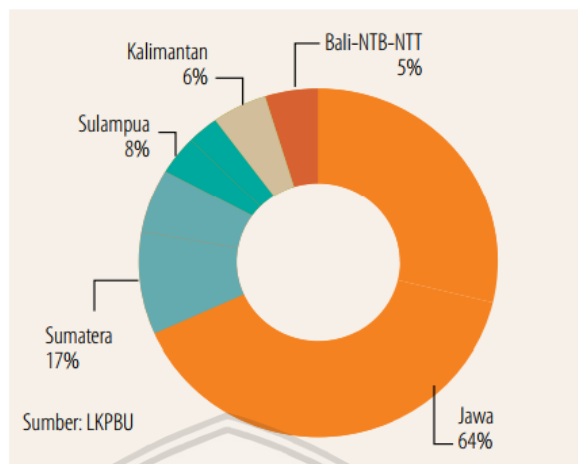
Kondisi tersebut merupakan fenomena yang banyak terjadi di berbagai negara khususnya negara berkembang. Munculnya permasalahan ketimpangan dan tingkat kemiskinan yang tinggi di negara-negara berkembang membuat masyarakat menjadi golongan eksklusi dari sistem keuangan. Tentunya Indonesia menjadi salah satu negara yang juga mengalami masalah tingginya tingkat eksklusi masyarakat dari layanan sektor keuangan formal.

Oleh sebab itu berdasarkan Booklet Keuangan Inklusif (2014), pada tahun 2011 dalam ASEAN summit, Indonesia telah sepakat bersama lembaga-lembaga dunia seperti World Bank, ADB dan organisasi internasional lainnya seperti G20, CGAP, AFI, APEC, ASEAN untuk meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang akan menjadi acuan dalam strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan data World Bank (2014), per 2014 ada sekitar 62% populasi dewasa di dunia yang telah memiliki akun keuangan dan masih sekitar 2 juta populasi dunia yang tergolong *unbanked*. Kondisi ini telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari tahun 2011 dimana hanya 51% populasi dunia yang memiliki akun finansial dan sebanyak 2,5 juta jiwa tergolong *unbanked people* di dunia. Masih berdasarkan data World Bank (2014), di Indonesia hanya 36% dari total populasi yang mendapatkan pelayanan jasa keuangan sisanya sebesar 64% masih bertransaksi keuangan tanpa melalui lembaga keuangan atau menggunakan *cash transaction* saat melakukan kegiatan ekonomi, namun angka ini cenderung meningkat dari tahun 2011 dimana hanya 19,6% indikasi inklusi keuangan di Indonesia.

Rendahnya tingkat inklusi keuangan di Indonesia diindikasikan dengan tingginya konsentrasi penyaluran layanan keuangan pada daerah-daerah tertentu. Konsentrasi penyaluran kredit yang tinggi akan menurunkan tingkat inklusi keuangan dan menghambat peningkatan investasi (Chauvet dan Jacolin, 2017). Ini dibuktikan dengan data yang menggambarkan porsi penyaluran kredit dan persebaran jaringan kantor Bank Umum Konvensional di Indonesia, sbb:

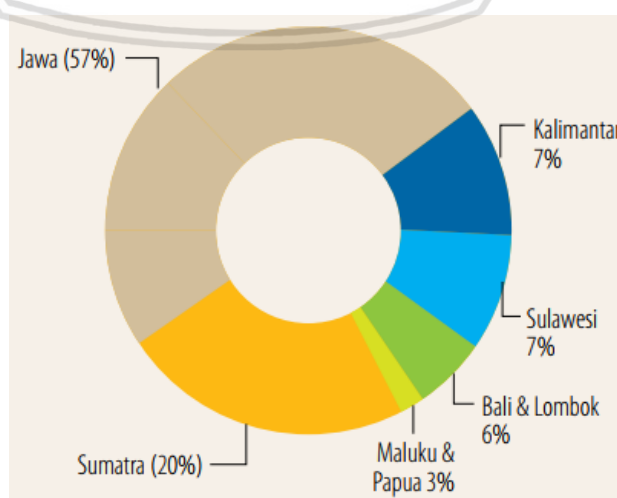
Gambar 1.1: **Penyebaran Jaringan Kantor BUK di Lima Wilayah Indonesia pada tahun 2016 Tw I**



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), 2016

Dari gambar 1.1 terlihat bahwa ketersediaan akses keuangan yang digambarkan dengan penyebaran jaringan kantor bank di Indonesia sangat besar di wilayah Pulau Jawa dibandingkan dengan wilayah lainnya. Tidak hanya dalam hal penyebaran akses keuangan namun porsi penyebaran penyaluran kredit juga terlihat sangat berkonsentrasi di Pulau Jawa. Berdasarkan data dari Bank Indonesia sebagai berikut;

Gambar 1.2: **Penyebaran Penyaluran Kredit UMKM Berdasarkan Wilayah Di Indonesia Periode 2016**



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), 2016

Padahal dari segi potensi wilayah, masing-masing daerah memiliki keunggulan potensi untuk disalurkan pada produk dan layanan keuangan yang sama rata. Tingginya konsentrasi pelayanan jasa keuangan hanya pada Pulau Jawa akan menurunkan potensi produktivitas di daerah lain yang memiliki potensi untuk berkembang. Hal ini tentu saja akan memperlebar tingkat ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi antar daerah maupun antar individu.

Hal ini menjadi sangat krusial, lantaran pendorongan program inklusi keuangan yang diharapkan adalah agar terwujudnya peluang yang sama dalam memperoleh akses layanan jasa keuangan, sebagai landasan strategi inklusi keuangan dalam mendorong pengurangan tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Crouzille et al. (2012), mengatakan bahwa sektor keuangan yang maju dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, oleh sebab itu populasi *unbanked people* harus dikurangi untuk menciptakan kinerja perekonomian yang efisien. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa hubungan positif antara sektor finansial dengan pertumbuhan ekonomi terlihat di negara-negara dengan tingkat pembangunan yang telah mencapai level cukup baik, dimana pada tingkat individu bank yang mendorong fungsi intermediasinya hingga dalam keadaan optimal akan menciptakan produk keuangan yang lebih kompetitif. Artinya terdapat ambang (*threshold effect*) tertentu yang harus dicapai, sebelum sektor finansial memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi

Namun Agénor dan Canuto (2017) tidak mendukung adanya arah kebijakan peningkatan akses layanan keuangan pada negara-negara kategori *Low Middle Income*. Alasannya mengatakan, kebijakan tersebut malah dapat menghambat terciptanya inovasi-inovasi dalam dunia usaha. Karakteristik negara golongan

Low Middle Income memiliki suatu kondisi yang disebut *middle-income trap* yang ditandai dengan rendahnya upah di beberapa sektor perekonomian, rendahnya tenaga kerja dengan kemampuan berinovasi dan pertumbuhan ekonomi yang cenderung masih rendah. Hal ini membuat tujuan kebijakan yang mengarah pada pengurangan konsentrasi akses layanan jasa keuangan dengan memperluas akses layanan jasa keuangan tidak akan berjalan efektif. Sebaiknya kebijakan diarahkan untuk mendukung terciptanya ide-ide yang produktif dan memberikan insentif pada investasi keahlian (*skills*).

Greenwood and Jovanovic (1990) bahkan membangun model yang memprediksikan bahwa pembangunan keuangan yang bisa dikaitkan dengan inklusi keuangan memiliki hubungan non-linear dengan tingkat kemiskinan, ketimpangan, dan kondisi pembangunan ekonomi. Artinya pada saat tertentu sektor keuangan bisa saja tidak memberikan dampak positif lagi terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan maupun mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik.

Namun banyak penelitian lain yang telah meneliti bahwa inklusi keuangan memiliki hubungan positif dengan tingkat pembangunan ekonomi dan kondisi sosial (Iqbal dan Sami, 2017), dan bahkan saling berkausalitas (Kim, 2017). Serta pada penelitian lain menemukan bahwa inklusi keuangan memiliki hubungan dengan pengurangan ketimpangan (Beck et al., 2007; Park and Mercado, 2015)

Untuk itu perlunya identifikasi lebih lanjut mengenai faktor apa saja yang dapat mendorong peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Dalam beberapa penelitian terdahulu seperti yang diungkapkan oleh Demircuc-Kunt dan Klapper, (2012), faktor karakteristik individu dan negara menjadi hal yang signifikan mempengaruhi inklusi keuangan di suatu negara.

Lebih lanjut penelitian dikembangkan oleh Fungacova dan Weill (2015) di China, karakteristik individu yang berpengaruh signifikan dalam peningkatan inklusi keuangan antara lain tingkat pendapatan yang tinggi, berpendidikan, bergender laki-laki, dan berusia dewasa memiliki hubungan positif dalam memperluas inklusi keuangan. Selain itu variabel makro ekonomi seperti pendapatan per kapita, *role of law*, dan karakteristik demografi juga turut mempengaruhi inklusi keuangan, menurut penelitian Park dan Mercado (2015).

Bahkan Penelitian yang dilakukan oleh Allen et al. (2012) yang mengestimasi faktor dan kebijakan yang dapat meningkatkan penggunaan akun bank yang menjadi proksi inklusi keuangan. Hasil penelitian tersebut memberikan saran terkait penurunan biaya dan mendorong tingkat aksesibilitas yang tinggi akan meningkatkan penggunaan dari akun keuangan tersebut. Penelitian ini juga menyarankan untuk mengurangi hambatan dalam mengakses layanan keuangan formal seperti biaya administrasi yang rendah, persyaratan dokumen-dokumen yang lebih sederhana dll, untuk meningkatkan inklusi keuangan dari sisi kepemilikan akun dan penggunaan akun dengan frekuensi yang tinggi.

Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Sarma dan Pais (2011), mengestimasi faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi inklusi keuangan, pada mulanya permodelan dengan menggunakan variabel kontrol GDP per kapita, jumlah populasi, jumlah tenaga kerja, populasi yang hidup di daerah terpencil dan indikator ketimpangan, hanya GDP per kapita saja yang memiliki hubungan signifikan positif mempengaruhi tingkat inklusi keuangan.

Selain itu pada beberapa negara kelompok MENA mengindikasikan ekspansi pada jaringan kantor bank dan memperluas lingkup lembaga keuangan mikro juga tidak berhasil menurunkan tingkat eksklusi keuangan (Neaime dan Gayset, 2017). Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil survei dalam

Financial Inclusion In Asia; Country Survey (2014) yang mengatakan bahwa perbedaan kondisi geografi dan kepadatan penduduk merupakan hambatan yang umum dalam proses inklusi keuangan disuatu negara. Wilayah yang terpencil dan potensi kantor bank yang sangat terbatas menimbulkan hambatan dalam menjangkau dan mendukung masyarakat untuk mengakses layanan keuangan. Dalam kondisi tersebut, mendukung inklusi keuangan dengan meningkatkan infrastruktur perbankan seperti membangun jaringan kantor baru dan ATM tidak memberikan hasil maksimal. Pasalnya banyak jaringan kantor bank yang hanya berlokasi di area-area perkotaan dan tidak dapat menjangkau masyarakat di daerah terpencil Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi proses inklusi keuangan disuatu negara atau kelompok negara. Untuk mendorong proses inklusi keuangan yang tinggi, terlebih dahulu harus mengetahui apa saja faktor yang dapat meningkatkan inklusi keuangan tersebut. Perbedaan karakteristik dan kondisi sosial maupun ekonomi antar negara menjadikan sulitnya menentukan apakah benar faktor-faktor yang disebutkan diatas merupakan faktor yang serupa terjadi dengan kondisi di Indonesia.

Pasalnya penelitian terdahulu, sebagian besar menggunakan data berbagai negara dan tidak terlalu dalam menjelaskan karakteristik yang mungkin berbeda diantara negara-negara tersebut. Jadi dalam banyak penelitian hanya mengambil kesimpulan secara umum tanpa memperhatikan kondisi tingkat pembangunan sektor keuangan per negara.

Oleh karena itu sangat penting untuk meneliti lebih jauh apakah faktor-faktor yang dapat mendorong peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Apakah faktor-faktor tersebut memiliki hasil yang sama antara wilayah-wilayah di Indonesia. Tingkat inklusi keuangan di Indonesia mungkin juga didorong oleh

karakteristik variabel individual dan kondisi makro maupun mikro ekonominya, serta sejauh mana peran perbankan memberikan pengaruh yang luas terhadap proses inklusi keuangan di Indonesia.

Alasan penelitian harus dilakukan khusus membahas tentang Indonesia, pasalnya Indonesia memiliki beberapa karakteristik yang mungkin tidak dimiliki negara lain. Indonesia dengan segala kelebihannya, baik itu dalam konteks luas wilayah, jumlah penduduk, kondisi sosial serta karakteristik individu per wilayah di Indonesia yang sangat beragam. Untuk itu perlu perhatian lebih dalam mengenai inklusi keuangan di Indonesia. Tentunya sektor jasa keuangan dalam hal ini melalui industri perbankan, yang akan berperan sangat besar dalam merealisasikan potensi tersebut dan menciptakan kesejahteraan yang lebih tinggi bagi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan data dan fakta bahwa pentingnya terlaksana program inklusi keuangan disuatu negara menjadi landasan utama penelitian lebih jauh mengenai faktor apa yang dapat mempengaruhi dan mendukung terlaksananya program keuangan inklusif tersebut.

Salah satu industri penting dalam hal mendukung program inklusi keuangan tersebut adalah peran industri perbankan. Luasnya cakupan lembaga-lembaga perbankan memiliki peran dan andil yang besar dalam mendukung proses inklusi keuangan. Secara umum gambaran aset sektor keuangan Indonesia pada tahun 2016, 73.23% masih didominasi oleh industri perbankan (Bank Indonesia, 2016).

Dalam penelitian ini mengambil sudut pandang kebijakan peningkatan inklusi keuangan yang berkaitan dengan industri perbankan. Pasalnya sektor keuangan merupakan sektor yang luas dan terdiri dari berbagai lembaga keuangan yang tentu saja dapat mendorong inklusi keuangan sesuai operasional masing-masing lembaga. Fokus penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan inklusi keuangan

yang diamati dari kegiatan Industri Perbankan Umum Konvensional terhadap kondisi ekonomi suatu wilayah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang dapat disimpulkan bahwa, beberapa penelitian menentang arah kebijakan inklusi keuangan dengan meningkatkan akses layanan keuangan. Selain itu terdapat kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar sektor keuangan berdampak positif terhadap kondisi perekonomian suatu negara. Namun penelitian lain jelas-jelas menunjukkan terdapat hubungan kausalitas antara inklusi keuangan dengan kondisi perekonomian.

Beberapa penelitian mengidentifikasi faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi inklusi keuangan. Fungacova dan Weill (2015), di China karakteristik individu yang berpengaruh signifikan dalam peningkatan inklusi keuangan antara lain tingkat pendapatan yang tinggi, berpendidikan, bergender laki-laki, dan berusia dewasa memiliki hubungan positif dalam memperluas inklusi keuangan. Selain itu variabel makro ekonomi seperti pendapatan per kapita, dan karakteristik demografi juga turut mempengaruhi inklusi keuangan, menurut penelitian Park dan Mercado (2015). Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Sarma dan pais (2011), mengestimasi faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi inklusi keuangan, menggunakan variabel kontrol GDP per kapita, jumlah populasi, jumlah tenaga kerja, populasi yang hidup di daerah terpencil dan indikator ketimpangan, hanya GDP per kapita saja yang memiliki hubungan signifikan positif mempengaruhi tingkat inklusi keuangan.

Selain itu pada beberapa negara kelompok MENA mengindikasikan ekspansi pada jaringan kantor bank dan memperluas lingkup lembaga keuangan mikro juga tidak berhasil menurunkan tingkat eksklusi keuangan (Neaime dan

Gayset, 2017).

Oleh sebab itu penelitian ini berusaha memperjelas lagi terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi inklusi keuangan di Indonesia, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pengaruh variabel kewilayahan yaitu tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan, jumlah penduduk, dan tingkat ketimpangan pendapatan terhadap inklusi keuangan di Indonesia?
- 2) Bagaimana pengaruh ketersediaan aksesibilitas yaitu jaringan kantor cabang perbankan, ATM dan penggunaan internet serta penggunaan telepon genggam terhadap inklusi keuangan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Mengetahui bagaimana pengaruh tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan, jumlah penduduk dan tingkat ketimpangan pendapatan, terhadap inklusi keuangan di Indonesia.
- 2) Mengetahui bagaimana pengaruh ketersediaan infrastruktur seperti jaringan kantor cabang perbankan, ATM dan penggunaan internet serta penggunaan telepon genggam terhadap inklusi keuangan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Agar dapat memberikan gambaran umum mengenai kondisi inklusi keuangan di Indonesia untuk dilakukan beberapa kebijakan yang terkait dalam mendorong proses inklusi keuangan
- 2) Memberikan masukan kepada pemangku kepentingan terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses inklusi keuangan dan diharapkan dapat memberi dukungan atas program inklusi keuangan



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Telaah Inklusi Keuangan

2.1.1 Konsep Inklusi Keuangan

Teori-teori pembangunan telah memberikan isyarat penting tentang dampak dari inklusi keuangan pada pembangunan ekonomi. Model yang tersedia mengilustrasikan bagaimana eksklusi keuangan dan komponennya seperti kekurangan akses pada layanan jasa keuangan bisa membawa pada kondisi terjebak dalam kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di masyarakat.

Sebelum istilah inklusi keuangan, terdapat beberapa penelitian awal yang mengarahkan pada munculnya istilah inklusi keuangan tersebut. Leyshon and Trift (1995) pada mulanya yang mendefinisikan eksklusi keuangan yang merupakan anti-thesis dari inklusi keuangan. Dimana kondisi eksklusi keuangan diartikan sebagai proses yang memastikan adanya beberapa halangan pada kelompok sosial dan individu tertentu dari keuntungan mengakses layanan keuangan formal.

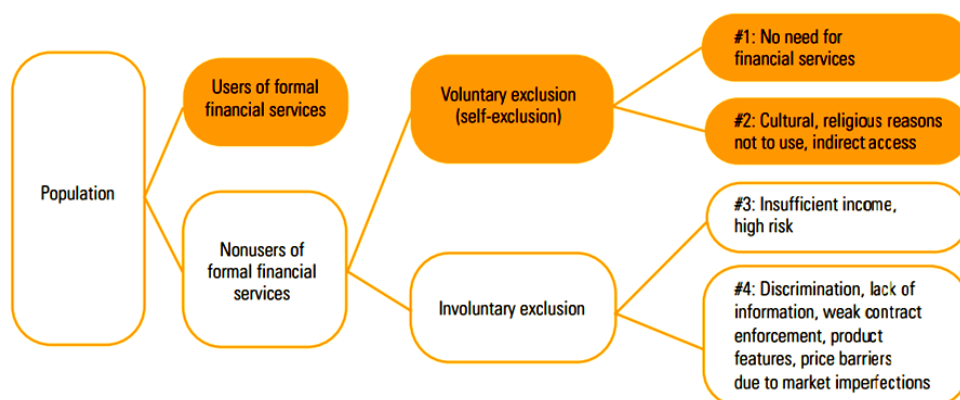
Kemudian pengertian eksklusi keuangan dikembangkan lagi oleh Sinclair (2001), finansial eksklusi artinya ketidakmampuan untuk mengakses kebutuhan layanan keuangan pada bentuk yang tepat.

Sistem keuangan yang inklusif sangat diperlukan karena berbagai alasan. Pemaparan dari hasil laporan World Bank (2014), mengatakan pentingnya inklusi keuangan untuk pembangunan sosial dan ekonomi yang menandakan bahwa pertumbuhan yang terkendali atas akses terhadap layanan jasa keuangan merupakan *critical point* yang dapat menurunkan angka kemiskinan, mendorong pertumbuhan yang inklusif serta pertumbuhan yang sustainable.

Masih menurut World Bank (2014), inklusi dan akses terhadap layanan jasa keuangan merupakan dua persoalan yang berbeda. Finansial inklusi didefinisikan sebagai proporsi atau bagian dari individu atau perusahaan yang telah menggunakan layanan jasa keuangan. Tidak menggunakan jasa keuangan bukan berarti tidak mendapatkan akses kepada lembaga keuangan. Maksudnya adalah ada beberapa orang atau kelompok orang yang memang dengan sengaja tidak menggunakan layanan keuangan padahal mereka memiliki kemampuan untuk mengakses layanan keuangan. Alasan seperti larangan dalam agama, keengganan terhadap peraturan dan administrasi lembaga keuangan yang terlalu rumit yang membuat individu atau perusahaan enggan mengakses jasa keuangan terkhususnya disektor keuangan formal seperti perbankan.

Penggolongan perilaku dan kondisi populasi terhadap layanan jasa keuangan disajikan pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.1: **Penggunaan dan Akses Terhadap Jasa Keuangan**



Sumber : World Bank, 2014

Jadi World Bank mendefinisikan finansial inklusi sebagai proporsi individu dan perusahaan yang menggunakan layanan jasa keuangan.

Sejalan dengan pendapat Beck et al., (2007) finansial inklusi didefinisikan sebagai penggunaan layanan jasa keuangan formal, yang merupakan kritikal point sebagai penentu perkembangan ekonomi.

Berbeda dengan definisi inklusi keuangan menurut Sarma (2008) adalah proses yang memastikan kemudahan dalam mengakses, ketersediaan, dan penggunaan dari layanan jasa sistem keuangan untuk semua anggota dalam sebuah perekonomian.

Pengertian inklusi keuangan dikembangkan lebih luas oleh Chakravarty et al., (2013) dengan definisi secara luas bahwa inklusi keuangan mengarah pada akses layanan jasa keuangan kepada setiap anggota dalam sebuah perekonomian. Lebih jauh, Chakravarty mendefinisikan finansial inklusi dapat di artikan sebagai proses yang akan menghilangkan hambatan dan mengatasi ketidakmampuan dari beberapa kelompok sosial dan individu-individu termasuk masyarakat miskin dan yang termarginalkan ke akses layanan jasa keuangan dan penggunaan yang rendah biaya, wajar dan aman terhadap layanan jasa keuangan seperti kredit, deposito, asuransi dan sistem pembayaran atau apapun yang mereka butuhkan.

Perkembangan pengertian inklusi keuangan selanjutnya dilengkapi dengan aspek sosial. Arun dan Kamath (2015), mendefinisikan inklusi keuangan sebagai suatu daerah yang mana setiap orang bisa menggunakan layanan jasa keuangan dengan kemudahan akses secara utuh dengan layanan keuangan yang berkualitas, menetapkan harga yang bisa dijangkau oleh masyarakat dengan cara yang sesuai, penuh hormat dan bermartabat.

Pada perkembangannya, Allen et al., (2016) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai penggunaan dari akun formal yang bisa memberikan banyak manfaat kepada individu-individu. Secara khusus didefinisikan sebagai penggunaan layanan jasa keuangan yang menargetkan pada pertumbuhan ekonomi yang menjadi perhatian para peneliti, pembuat kebijakan, dan *stakeholders* lainnya yang berkaitan dengan jasa keuangan.

Sedikit berbeda dengan Iqbal dan Sami (2017), yang mendefinisikan inklusi keuangan sebagai sebuah proses yang memastikan akses ke layanan jasa keuangan dengan waktu yang tepat, kredit memadai yang diperlukan oleh masyarakat yang kurang sejahtera seperti kelompok masyarakat yang lemah dan berpendapatan rendah dengan biaya yang rendah.

Kim et al. (2017), mendefinisikan inklusi keuangan yang berarti kemudahan dalam akses dan ketersediaan layanan jasa keuangan formal seperti deposito perbankan, kredit, asuransi dll. untuk semua partisipan dalam perekonomian.

Sedangkan di Indonesia, pengertian inklusi keuangan dituangkan dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (2014), yang mendefinisikan inklusi keuangan sebagai hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya. Layanan keuangan tersedia bagi seluruh segmen masyarakat dengan perhatian khusus kepada orang miskin, orang miskin produktif, pekerja migrant, dan penduduk di daerah terpencil.

Dan pada akhirnya secara umum terdapat beberapa aspek penting yang memiliki sudut pandang sama dalam semua pengertian yakni kemudahan

akses dan penggunaan terhadap layanan keuangan bagi masyarakat yang membutuhkan produk jasa keuangan.

Dalam penelitian ini, pengertian inklusi keuangan yang digunakan adalah mengikuti pengertian dalam penelitian yang dilakukan oleh Sarma (2008), dimana inklusi keuangan diartikan sebagai proses yang menjamin kemudahan akses, ketersediaan dan penggunaan dari layanan keuangan untuk semua anggota dalam sebuah perekonomian.

Pengertian yang dipaparkan oleh Sarma menggambarkan adanya dimensi-dimensi yang dapat membentuk pengukuran inklusi keuangan yang tercermin dalam nilai indeks inklusi keuangan. Dalam penelitian ini akan mencoba untuk menghitung indeks inklusi keuangan sebagai proksi nilai inklusi keuangan di Indonesia untuk setiap provinsi dalam periode waktu 2012-2015.

2.1.2 Indikator Inklusi Keuangan

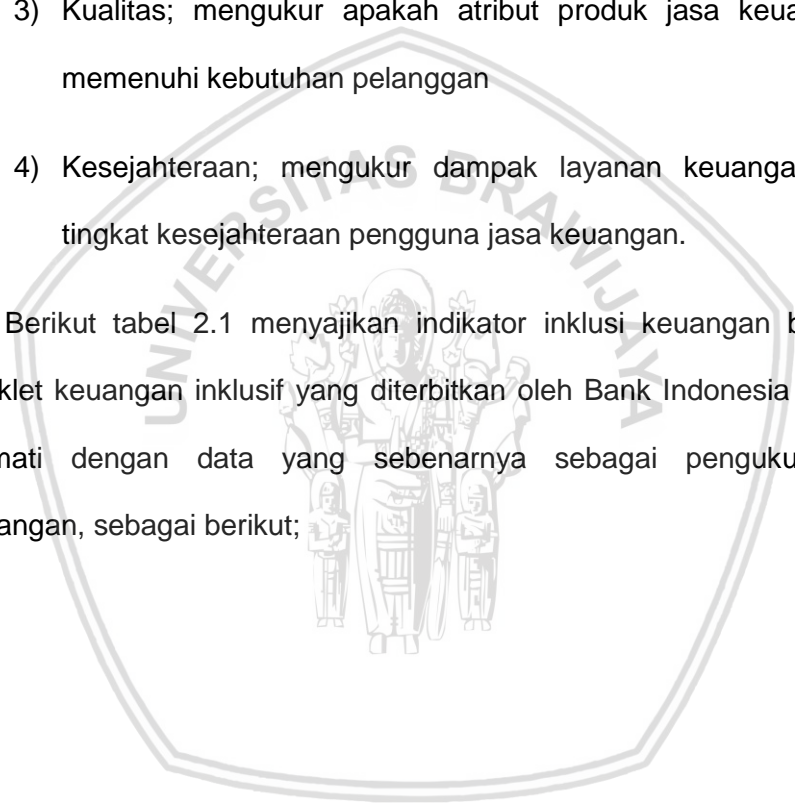
World Bank (2008), menggunakan indikator akses jasa keuangan diukur dengan jumlah kantor bank dan jumlah ATM yang tersebar pada suatu wilayah. Penggunaan jasa keuangan diukur dengan jumlah deposit serta kredit yang disalurkan.

Namun seiring perkembangan penyempurnaan indikator pengukuran inklusi keuangan, Booklet Keuangan Inklusif yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2014, dijelaskan bahwa untuk melihat sejauh mana perkembangan kegiatan keuangan inklusif di Indonesia, BI selaku otoritas

moneter telah menyusun sebuah ukuran kinerja atau indikator yang menjadi ukuran dalam melihat perkembangan inklusi keuangan, yaitu;

- 1) Ketersediaan/ akses; mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga;
- 2) Penggunaan; mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan seperti frekuensi dan lama penggunaan
- 3) Kualitas; mengukur apakah atribut produk jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan
- 4) Kesejahteraan; mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat kesejahteraan pengguna jasa keuangan.

Berikut tabel 2.1 menyajikan indikator inklusi keuangan berdasarkan booklet keuangan inklusif yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang dapat diamati dengan data yang sebenarnya sebagai pengukuran inklusi keuangan, sebagai berikut;



Tabel 2.1: Indikator Keuangan Inklusif yang Digunakan Bank Indonesia

Dimensi	Indikator	Keterangan
Akses	Jumlah akses point per 10.000 penduduk dewasa di level nasional dan terbagi berdasarkan jenis dan unit administrative	Akses point ; tempat melakuakn transaksi cash in/cash out (Bank, ATM, agen/UPLK)
		jenis kases point
		unit administratif; provinsi dan kabupaten
		jumlah penduduk dewasa adalah penduduk usia produktif (>20 tahun)
	Persentase jumlah unit administratif yang memiliki minimal satu akses point	Unit administratif; provinsi dan kabupaten
	Persentase dari total populasi yang tinggal di suatu unit administrasi yang memiliki minimal satu akses point	Total populasi dalam provinsi dan kabupaten
	Jumlah akses point per 10 km ²	Akses point; tempat melakuakn transaksi cash in/cash out (Bank, ATM, agen/UPLK)
Penggunaan	Persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki minimal satu jenis rekening simpanan (untuk negara yang tidak memiliki data ini dapat menggunakan jumlah rekening simpanan per 10.000 penduduk dewasa)	Jumlah rekening simpanan per 10.000 penduduk dewasa
		Rekening simpanan; giro, tabungan, deposito berjangka
	Persentase jumlish penduduk yang memiliki minimal satu jenis rekening pinjaman (untuk negara yang tidak memeiliki data ini dapat menggunakan jumlah rekening pinjaman per 10.000 penduduk dewasa	Jumlah rekening pinjaman per 10.000 penduduk dewasa

Sumber : Bank Indonesia, 2014 : hal 14

Mirip dengan penelitian Sarma (2012) yang mendefinisikan inklusi keuangan sebagai sebuah proses untuk memudahkan akses, ketersediaan dan penggunaan dari sistem keuangan formal bagi seluruh anggota dalam sebuah perekonomian. Definisi ini kemudian mendorong beberapa dimensi yang harus dikembangkan dalam mendukung proses inklusi keuangan tersebut yakni dimensi aksesibilitas, ketersediaan, dan dimensi penggunaan pada sistem keuangan formal. Semua dimensi ini bersama-sama membangun keuangan yang inklusif. Perbankan merupakan gerbang yang paling mendasar karena menyediakan layanan jasa keuangan sehingga merupakan media yang tepat sebagai pendorong proses inklusi keuangan di suatu negara.

Masih dalam penelitian yang sama, Sarma merangkum satu konsep berkaitan dengan alternatif pengukuran inklusi keuangan yaitu Indeks Inklusi Keuangan (*Index of Financial Inclusion*). Indeks ini sendiri digunakan untuk mengukur keinklusiannya sistem keuangan di suatu negara. Perhitungan Indeks Inklusi Keuangan yang dikembangkan oleh Sarma terbagi atas tiga dimensi yaitu:

- 1) Penetrasi Perbankan. Penetrasi perbankan adalah indikator utama dalam inklusi keuangan. Semakin banyak penggunaannya maka semakin baik, karena itu sistem keuangan diharapkan dapat menjangkau secara luas di antara penggunanya. Salah satu indikator penetrasi perbankan adalah proporsi populasi yang memiliki rekening di bank.
- 2) Ketersediaan jasa keuangan. Jasa keuangan harus tersedia bagi semua pengguna, dalam suatu sistem keuangan yang inklusif. Ukuran ketersediaan ini adalah jumlah *outlet* (jaringan kantor bank, ATM, dan

lain lain). Ketersediaan jasa keuangan juga dapat dilihat dari jumlah jaringan lembaga keuangan atau jumlah ATM (*Automatic Teller Machine*). Tidak bisa dipungkiri ATM memiliki peranan yang sangat penting bagi jasa perbankan dalam melayani kebutuhan masyarakat. Kemudahan dalam mengambil tunai, penyetoran tunai serta digunakan untuk pembayaran membuat ATM menjadi kebutuhan mutlak bagi masyarakat. Dengan adanya jaringan kantor bank dan ATM, masyarakat akan semakin mudah menjangkau jasa keuangan.

- 3) Penggunaan jasa perbankan. Banyak alasan mengapa sekelompok orang masih belum memanfaatkan keberadaan jasa keuangan meskipun mereka memiliki akses terhadap jasa keuangan. Di antaranya, jauhnya *outlet* bank dari tempat kediaman atau aktivitas sehari-hari, pengalaman buruk terhadap layanan jasa keuangan, dll. Penggunaan produk-produk layanan jasa keuangan yang dimaksud bisa dalam bentuk kredit, deposito, pembayaran, transfer, dll. Data indikator yang tepat untuk mengukur dimensi penggunaan yaitu volume kredit dan deposito penduduk dewasa terhadap proporsinya ke GDP.

Dengan mengacu pada indikator yang dibangun oleh Sarma penelitian Park dan Mercado (2015) mengembangkan indikator inklusi keuangan dimana terdapat lima dimensi pengukuran sebagai indikator inklusi keuangan yaitu; jumlah ATM per 100,000 org dewasa, jumlah jaringan kantor cabang bank per 100,000 orang dewasa, jumlah peminjam pada bank komersial per 1,000 orang dewasa, jumlah deposan pada bank komersial per 1,000 org dewasa, dan rasio kredit terhadap GDP. Pengukuran untuk dua poin yang pertama menyangkut ketersediaan jasa perbankan sebagai dimensi inklusi keuangan sedangkan tiga lainnya mengarah pada dimensi

penggunaan dari inklusi keuangan.

Penelitian terbaru mengembangkan indikator inklusi keuangan lebih lanjut dengan beberapa tambahan seperti yang dilakukan Kim (2017) menjabarkan bahwa terdapat lima variabel sebagai pengukuran utama dari inklusi keuangan yakni :

- 1) Proksi pertama adalah ATM per 100,000 populasi dewasa, dimana pengukuran ini dapat diukur dengan kepemilikan akun. Asumsinya bahwa kepemilikan akun dapat mengindikasikan berapa banyak masyarakat atau perusahaan yang memiliki akun pada lembaga keuangan formal walaupun cara terbaik dalam mengukur indikator ini adalah dengan menghitung jumlah populasi yang memiliki akun di lembaga keuangan formal.
- 2) Pengukuran jaringan kantor bank per 100,000 populasi dewasa sebagai proksi dari penetrasi lembaga keuangan formal. Pengukuran ini dapat menduga pemerataan layanan lembaga keuangan formal disuatu negara dari jumlah jaringan kantor bank.
- 3) Pengukuran dengan akun deposito bank komersial per 1000 populasi dewasa sebagai proksi dari simpanan. Karena deposito merupakan representasi dari berapa banyak masyarakat membuka akun simpanannya di lembaga keuangan
- 4) Pinjaman dari bank komersial per 1000 populasi dewasa sebagai proksi dari kredit.
- 5) Indikator terakhir adalah penggunaan produk *life insurance* sebagai proksi dari asuransi.

Walaupun terdapat indikator lain yang digunakan untuk mengukur indeks inklusi keuangan, seperti yang di paparkan Amidžić et al., (2014)

yang menyusun indikator inklusi keuangan sebagai komposisi dari variabel-variabel yang menyangkut dimensi, jangkauan (penetrasi geografi dan demografi), usage (deposit dan pinjaman) dan kualitas (syarat administrasi, penanganan masalah, dan biaya dari penggunaan produk).

2.1.3 Pengukuran Indeks Inklusi Keuangan

Perhitungan indeks inklusi keuangan menggunakan metode Sarma sbb:

a) Perhitungan nilai masing-masing dimensi

$$d_i = w_i \frac{A_i - m_i}{M_i - m_i}$$

(1)

Dimana :

w_i = pembobotan untuk dimensi i

A_i = nilai actual dari dimensi i

m_i = batas bawah (nilai minimum) dari dimensi i

M_i = batas atas (nilai maksimum) dari dimensi i

Dari hasil perhitungan formula (1) didapatkan bahwa $0 \leq d_i \leq w_i$. Semakin tinggi d_i , semakin baik pula pengukuran keberhasilan suatu negara atau daerah pada dimensi i tersebut.

b) Penentuan nilai batas atas (M_i) dan batas bawah (m_i) setiap dimensi

Penentuan batas atas dan batas bawah sangat penting dalam proses normalisasi nilai setiap dimensi agar nilai setiap dimensi (d_i) nantinya selalu berada dalam posisi 0 dan w_i . Untuk itu sangat

penting menetapkan nilai $M1$ dan m_i agar bernilai sama/tetap untuk setiap tahunnya. Jadi IFI dihitung untuk tahun dan wilayah yang berbeda dengan nilai *benchmark* yang sama dari masing-masing dimensi.

Dimana nilai m_i sebagai batas bawah ditetapkan bernilai 0 untuk semua dimensi. Sedangkan nilai M_i bisa saja merupakan nilai tertinggi dari data yang tersedia. Namun dalam hal ini bisa terdapat dua masalah. Yang pertama, data tertinggi secara empiric bisa saja menjadi data “outlier”, masalah tersebut akan membuat rusaknya skala indeks yang ditentukan. Selain itu data maksimum yang outlier bila digunakan akan membuat nilai IFI wilayah atau negara lain rendah, walaupun sebenarnya performa layanan sistem keuangan mereka mungkin saja bagus. Masalah kedua, saat menggunakan data maksimum yang outlier sebagai batas atas, dimana harusnya nilainya berbeda-beda untuk setiap tahunnya dan akan menyulitkan bila membandingkan indeks tersebut antar waktu.

Untuk itu setiap data observasi harus diuji outlier terlebih dahulu. Jika ada indikasi data observasi yang outlier maka untuk menentukan nilai batas atas (M_i) dilakukan perhitungan rata-rata kecenderungan 90 persentil distribusi data untuk masing-masing dimensi.

Dalam penelitian ini, semua data observasi masing-masing dimensi, dimana nilai observasi tertinggi merupakan nilai yang outlier. Sehingga data M_i yang digunakan adalah data hasil perhitungan 90 persentil. Untuk itu semua data yang outlier harus diganti dengan data 90 persentil tersebut.

c) Penentuan bobot setiap dimensi

Berdasarkan metode Sarma (2012), pembobotan untuk setiap dimensi sangat sulit ditentukan, pasalnya ketiga dimensi yang menyusun indeks inklusi keuangan yaitu dimensi penetrasi perbankan, dimensi ketersediaan akses perbankan dan dimensi penggunaan. Semua dimensi tersebut sama-sama pentingnya untuk mendukung layanan sistem keuangan yang inklusif.

Sejauh ini, ketersediaan layanan perbankan tidak hanya terkait jumlah kantor cabang ataupun outlet ATM saja. Pasalnya mungkin di banyak daerah lain sudah beralih pada internet banking atau mobile banking yang menggeser peran penting fisik outlet perbankan itu sendiri. Namun untuk wilayah-wilayah di Indonesia sendiri, masih minimnya penggunaan internet banking ataupun *mobile banking* oleh masyarakat masih belum dapat menggantikan peran kantor fisik bank. Sehingga dalam penelitian ini pemberian bobot pada dimensi *avaliabilitas* dengan data ATM dan Kantor cabang bank adalah 1. Nilai dimensi *avaliabilitas* dari data ATM dan kantor cabang dinilai sama pentingnya dalam menentukan basaran inklusi keuangan di Indonesia.

Begitu pula dengan dimensi penggunaan yang mencakup data volume kredit dan deposit. Dimensi penggunaan juga akan diberikan bobot 1. Walaupun banyak layanan produk keuangan lainnya juga yang dapat menggambarkan kelengkapan dimensi penggunaan produk perbankan seperti *payments*, *transfers*, *remittance*, yang tidak dimasukan dalam perhitungan.

Pasalnya dalam artikel Sarma (2012) menjelaskan bahwa jika pertimbangan terkait semua nilai dimensi dianggap sama penting dalam mengukur tingkat keingklusifan layanan system keuangan maka $w_i = 1$ untuk semua dimensi i .

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini mengikuti pembobotan yang digunakan oleh Sarma (2012) yang juga diaplikasikan oleh penelitian Sanjaya (2014), dimana bobot 1 untuk indeks dimensi penetrasi perbankan (d_1), 1 untuk indeks dimensi ketersediaan (*avaliability*)(d_2), dan 1 untuk indeks dimensi penggunaan (*usage*) (d_3).

Jadi dari penentuan pembobotan tersebut, dapat disajikan bahwa daerah i pada titik (d_{1i}, d_{2i}, d_{3i}) tiga dimensi masing-masing berada pada: dimensi penetrasi $0 \leq d_1 \leq 1$, dimensi ketersediaan $0 \leq d_2 \leq 1$, dimensi penggunaan $0 \leq d_3 \leq 1$. Dimana (0,0,0) merupakan nilai terburuk dari setiap dimensi dan titik (1,1,1) merupakan titik ideal atau optimal dari masing-masing dimensi di setiap wilayah.

Setelah menyelesaikan tiga dimensi, dimensi nilai tunggal (*single value dimension*) akan ditempatkan antara 0 dan w_i ($0 \leq d_i \leq w_i$).

Nilai dimensi $_i$ yang mendekati w_i menunjukkan area dengan capaian tertinggi pada dimensi $_i$.

Selanjutnya menentukan nilai X_1 yang merupakan jarak normalitas Eclidean X dari titik terendah 0, sedangkan X_2 merupakan jarak normalitas X dengan titik ideal w . IFI akan diproses dengan menggunakan rumus di bawah ini.

$$X1 = \frac{\sqrt{d_1^2 + d_2^2 + d_3^2 + \dots + d_n^2}}{\sqrt{w_1^2 + w_2^2 + w_3^2 + \dots + w_n^2}} \quad (2)$$

$$X2 = 1 - \frac{\sqrt{(w_1 - d_1)^2 + (w_2 - d_2)^2 + (w_3 - d_3)^2 + \dots + (w_n - d_n)^2}}{\sqrt{w_1^2 + w_2^2 + w_3^2 + \dots + w_n^2}} \quad (3)$$

Jadi IFI merupakan rata-rata sederhana dari $X1$ dan $X2$

$$IFI = \frac{1}{2} [X1 + X2] \quad (4)$$

Nilai indeks dari setiap dimensi terletak antara 0 dan w_i . Nilai d_i yang lebih tinggi mengindikasikan lebih tinggi pada titik ideal dimensi ke i . Titik $X = (d_1, d_2, d_3, \dots, d_n)$ menunjukkan pencapaian inklusi keuangan pada suatu provinsi. Kemudian pada ruang dimensi, point $O = (0, 0, 0)$ merepresentasikan situasi yang terburuk, sedangkan titik $W = (w_1, w_2, w_3, \dots, w_n)$ – di mana w_1, w_2 , dan w_3 adalah bobot setiap dimensi yang mewakili situasi paling ideal untuk seluruh dimensi.

Pada formula (2) dimana nilai X_1 merupakan hasil normalisasi jarak dari titik X ke titik terendah O dan normalisasi dari jarak antara titik terendah O dan titik ideal W . setelah proses penormalisasian, maka nilai X_1 harusnya berada diantara 0 dan 1. Implikasi nilai X_1 yang semakin tinggi menunjukan suatu daerah lebih inklusif.

Selanjutnya formula (3) yang menjelaskan perhitungan nilai X_2 , dimana penormalisasian jarak invers X dari titik ideal W . Nilai X_2 setelah dinormalisasikan akan berada pada range 0 dan 1. Dan semakin tinggi nilai X_2 akan berhubungan dengan peningkatan inklusi keuangan.

Dengan titik $W = (1,1,1)$, maka rumus akhir dari IFI adalah;

$$IFI = \frac{1}{2} \left[\frac{\sqrt{d1^2 + d2^2 + d3^2}}{\sqrt{3}} + \left(1 - \frac{\sqrt{(1-d1)^2 + (1-d2)^2 + (1-d3)^2}}{\sqrt{3}} \right) \right] \quad (5)$$

Nilai IFI berada pada *range* 0 dan 1. Jika nilai IFI suatu daerah mendekati nilai 1, maka tingkat inklusi keuangan di daerah tersebut bisa dikatakan tinggi. Begitupun sebaliknya, nilai IFI yang mendekati bisa dikatakan cenderung eksklusif dari layanan keuangan.

Nilai IFI dapat dikategorikan dalam tiga kelompok menurut penelitian Sarma (2012), dimana kelompok pertama adalah nilai $0.6 < IFI < 1$. Kelompok wilayah yang memiliki nilai IFI diantara 0.5 hingga 1 dikategorikan sebagai wilayah *High Inclusion*. Kelompok kedua adalah wilayah dengan nilai IFI $0.3 < IFI < 0.6$ dikategorikan dalam kelompok *Medium financial inclusion*. Yang terakhir adalah kelompok *low*, dimana nilai indeks inklusi keuangan suatu wilayah berada di bawah 0.3.

Penelitian ini menggunakan tiga dimensi untuk mengukur Indeks Inklusi Keuangan (Index of Financial Inclusion) yang terdiri dari *aksesibilitas* ($d1$), *availabilitas* ($d2$), dan *penggunaan* ($d3$).

Indikator aksesibilitas menggambarkan penetrasi institusi keuangan formal dengan data jumlah rekening perbankan umum konvensional per 1000 orang dewasa. Sedangkan availabilitas diindikasikan oleh jaringan kantor cabang dan outlet ATM perbankan umum konvensional per 100,000 penduduk dewasa. Yang terakhir adalah penggunaan, dimensi yang terdiri dari indikator volume kredit dan DPK per PDRB setiap provinsi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada mulanya Demirgüç-Kunt et al. (2011), menulis artikel tentang pengaruh kegiatan transfer (remittances) terhadap perluasan dan pendalaman sektor perbankan di Meksiko. Walaupun dalam penelitian tersebut tidak menyinggung masalah karakteristik individu maupun sosial, yang mempengaruhi perluasan dan pendalaman sektor perbankan, namun dalam artikel tersebut memuat faktor-faktor tambahan dalam permodelan yang dapat mempengaruhi tingkat perluasan dan pendalaman sektor perbankan. Tingkat pendalaman dan perluasan sector keuangan diprokskan dengan variable penggunaan akun deposit dan layanan kredit di lembaga keuangan. Selain variabel utama kegiatan transfer, terdapat penggunaan variable independen lainnya meliputi jumlah populasi, GDP per kapita, tingkat pendidikan, jarak ke kota terdekat dengan meksiko. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode panel data dengan model fix efek dan menggunakan estimasi tobit. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa transfer sangat berhubungan erat dengan perluasan dan pendalam layanan perbankan yang besar, meningkatkan jumlah jaringan kantor cabang dan pendapatan per kapita serta porsi deposito terhadap GDP meningkatkan inklusi keuangan di meksiko.

Selanjutnya penelitian dengan terobosan baru terkait inklusi keuangan di lakukan oleh Sarma dan Pais, (2011). Dengan penulisan artikel ilmiah terkait inklusi keuangan dan pembangunan yang menganalisis antar negara. Menggunakan indeks inklusi keuangan yang dibangun oleh Sarma (2008), penelitian ini mengidentifikasikan faktor-faktor yang signifikan berhubungan dengan inklusi keuangan. Faktor sosial-ekonomi seperti Indeks pembangunan

manusia, pendapatan, ketimpangan pendapatan dan literasi. Selain itu fisik infrastruktur untuk berhubungan dan berbagi informasi. Selain itu variabel lainnya dari sisi sektor perbankan seperti NPA dan CAR juga diteliti untuk melihat pengaruhnya terhadap inklusi keuangan. Data yang digunakan meliputi data 49 negara dengan data periode 2004. Menggunakan metode regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama dalam mengukur tingkat pembangunan manusia sangat berhubungan dengan inklusi keuangan. Selanjutnya pendapatan berhubungan positif dengan inklusi keuangan, infrastruktur yang menghubungkan dan berbagi informasi signifikan berhubungan dengan inklusi keuangan. NPA dan CAR memiliki hubungan negatif terhadap inklusi keuangan.

Chakravarty dan Pal (2013), meneliti kembali pendekatan inklusi keuangan di India. Dalam artikel tersebut, pertama-tama dibangun sebuah pengukuran yang jelas untuk mengukur inklusi keuangan dari sisi supply layanan perbankan yang terdiri dari enam indikator yakni penetrasi geografi dan demografi, jumlah akun deposit dan kredit per 1.000 masyarakat, rasio deposito per pendapatan dan rasio kredit per pendapatan. Penelitian dilanjutkan dengan mengestimasi dampak pada kebijakan prioritas di sektor perbankan di India selama tahun 1972-2009, dengan menggunakan teknik ekonometrika panel data dalam menganalisa masalah tersebut (GMM metode). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sosial banking memiliki peran penting dalam mempercepat inklusi keuangan antar daerah di India selama tahun 1977-1990. Kemudian, pergeseran kebijakan yang lebih mendukung reformasi sektor pasar keuangan tidak berdampak terlalu baik terhadap inklusi keuangan. Dalam penulisan ini mengidentifikasi bahwa penetrasi geografi perbankan dan ketersediaan kredit merupakan dua target

kebijakan untuk mempercepat inklusi keuangan di india. Inklusi keuangan di proksikan dengan data indeks inklusi keuangan.

Disisi lain Demirgüç-Kunt and Klapper (2013), juga meneliti terkait alternatif pengukuran inklusi keuangan. Sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi inklusi keuangan dengan menggunakan data pada periode 2011 dari the World Bank's Global Findex. Dengan menganalisis penggunaan layanan keuangan pada 148 negara. Penelitian tersebut menguji karakter individual dan karakter suatu negara yang berhubungan dengan tiga indikator inklusi keuangan; kepemilikan akun formal, akun tabungan bank, penggunaan kredit bank. Hasilnya menunjukkan bahwa perbedaan pendapatan antar negara maupun antar individu sangat mempengaruhi tingkatan inklusi keuangan di suatu negara

Penelitian lebih lanjut dikembangkan dengan lingkup subyek kelompok negara-negara tertentu, seperti yang dilakukan oleh Van der Werff et al., (2013). Penelitian tersebut menemukan hubungan antara inklusi keuangan yang diproksikan oleh persentase populasi dewasa (>15 tahun) yang menggunakan layanan keuangan di lembaga formal, dengan faktor sosial. Menggunakan data dari Global Findex pada 31 OECD countries. Penelitian tersebut menyajikan fakta dan bukti untuk mendukung pernyataan bahwa tingkat kepercayaan yang tinggi pada pemerintahan dan lembaga keuangan formal akan meningkatkan tingkat inklusi keuangan. Sebaliknya ketimpangan pendapatan dapat menghambat penggunaan layanan keuangan formal. Selain itu faktor non-finansial menjadi sangat penting juga sebagai faktor penentu dalam meningkatkan inklusi keuangan.

Perkembangan penelitian inklusi keuangan selanjutnya dengan membandingkan antara satu negara dengan negara lain seperti yang dilakukan oleh Fungacova dan Weill (2015), menulis artikel terkait inklusi keuangan di

China. Dengan menggunakan data base tahun 2011 dari World Bank Global Findex untuk menganalisis inklusi keuangan di China, termasuk membandingkannya dengan negara BRICS lainnya dengan menggunakan metode probit estimasi. Data variabel kontrol yang merupakan variabel yang menggambarkan karakteristik individual yaitu: pendapatan, pendidikan, usia, dan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan di China lebih tinggi dibandingkan negara BRICS lainnya yang didukung oleh besarnya penggunaan akun keuangan formal dan tabungan di sektor keuangan formal. Namun penggunaan kredit di China masih tergolong rendah dibandingkan negara BRICS lainnya. Hasil penelitian selanjutnya menyatakan bahwa pendapatan yang tinggi, berpendidikan, bergender laki-laki, dan berusia dewasa sangat berhubungan dengan peningkatan penggunaan akun formal dan akses kredit formal di China. Variabel inklusi keuangan di proksikan dengan 3 indikator yaitu; kepemilikan akun formal, tabungan di lembaga keuangan formal, penggunaan kredit bank.

Masih dalam tahun yang sama, penelitian lain dilakukan dengan mengambil sudut pandang yang lebih kompleks terkait inklusi keuangan, kemiskinan, dan ketimpangan negara-negara berkembang di Asia yang dilakukan oleh Park dan Mercado, (2015). Penulisan penelitian ini berdasarkan literature inklusi keuangan yang berfokus pada negara perekonomian sedang berkembang di Asia. Dimana inklusi keuangan diproksikan dengan indeks inklusi keuangan yang terdiri dari dua dimensi pengukuran yakni dimensi availabilitas dan dimensi penggunaan. Dengan mengestimasi kondisi makro ekonomi dan karakteristik setiap negara sebagai faktor yang mempengaruhi derajat inklusi keuangan di 37 negara yang perekonomiannya sedang berkembang di Asia. Penelitian ini juga menguji dampak inklusi keuangan terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Dalam penelitian ini menghitung nilai indeks inklusi keuangan dengan metode yang digunakan Sarma dan juga menggunakan metode regresi untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi inklusi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan perkapita, *role of law*, dan faktor demografi signifikan mempengaruhi indikator inklusi keuangan di Asia. Ekonomi dengan populasi yang besar juga cenderung meningkatkan akses ke layanan jasa keuangan.

Disisi lain penelitian inklusi keuangan juga dilakukan per individu negara, seperti yang dilakukan oleh Babajide et al.,(2015). Penelitian ini mengidentifikasi dampak dari inklusi keuangan pada pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Tujuannya untuk memperjelas faktor penentu dari inklusi keuangan dan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan model OLS. Inklusi keuangan diproksikan dengan jumlah deposit di bank komersial. Dari hasil estimasi OLS tersebut variabel kontrol yang digunakan adalah capital working, total faktor produktif, suku bunga, proporsi penjualan grosir dan retail terhadap PDB, kondisi politik, koefisien gini, sumber pinjaman total, dan jumlah jaringan kantor perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jaringan kantor bank akan menarik peningkatan penggunaan akun bank formal. Demikian juga kestabilan politik dan tingkat pendapatan merupakan kategori penentu yang paling dasar dalam mempengaruhi transaksi keuangan dan penggunaan akun formal perbankan.

Kostov et al. (2015), juga menulis artikel ilmiah terkait inklusi keuangan dengan mendalami sebuah kebijakan yang telah diberlakukan terkait tujuan inklusi keuangan pada Negara Afrika Selatan. Tujuan penelitian ini untuk memahami sejauh mana keputusan rumah tangga untuk mengakses layanan keuangan, dengan memasukkan analisis tingkat Mzansi akun di Afrika Selatan. Ketersediaan untuk mengakses layanan keuangan bukan karena sebuah pemberian tapi lebih

dikarenakan oleh tingkat persepsi dan perilaku. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses keputusan rumah tangga dalam mengakses layanan keuangan bergantung pada tingkat pendidikan (aspirasi) dan literasi keuangan. Penelitian ini menggunakan metode logistic regression.

Masih dalam lingkup pembahasan satu negara terkait inklusi keuangan. Zins dan Weill (2016), mendalami dan memperbaharui penelitian terkait faktor penentu inklusi keuangan di negara Afrika. Objek penelitian dalam paper ini adalah untuk menguji faktor penentu inklusi keuangan di Afrika. Dengan menggunakan data dari World Bank's Global Findex pada 37 negara yang ada di Afrika, periode data tahun 2014. Dengan menggunakan estimasi probit. Inklusi keuangan diproksikan dengan tiga indikator inklusi keuangan yaitu; kepemilikan akun perbankan, akun simpanan di bank dan penggunaan kredit di perbankan. Variabel kontrol yang digunakan adalah usia, gender, pendapatan dan pendidikan. Hasilnya menggambarkan bahwa, pendapatan tinggi, bergender laki-laki, kaya, lebih berpendidikan dan lebih dewasa memiliki hubungan dengan peningkatan inklusi keuangan.

Allen et al. (2016), menulis artikel yang lebih menekankan pada kepemilikan akun dan penggunaannya yang menggambarkan inklusi keuangan pada kelompok negara. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai karakter individu dan suatu negara yang berhubungan dengan inklusi keuangan dan perumusan kebijakan yang efektif diantara masyarakat yang tergolong eksklusif keuangan seperti masyarakat miskin, terpencil dan remaja. Dengan menggunakan estimasi probit, dibentuk 3 permodelan untuk melihat masing-masing pengaruh dari proksi inklusi keuangan yaitu kepemilikan akun formal, simpanan dan frekuensi penggunaan penggunaan akun keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan inklusi keuangan berhubungan

dengan biaya akun yang rendah, perluasan fungsi intermediari keuangan, peraturan legal yang kuat, dan lingkungan politik yang stabil. Efektifitas dari sebuah kebijakan untuk mendukung inklusi keuangan bergantung pada pertimbangan karakter individu tersebut.

Penelitian terbaru dilakukan oleh Mylonidis et al., (2017). Terkait eksklusi keuangan di US dengan memperhatikan faktor demografi. Penelitian ini berusaha menguji korelasi antara faktor demografi/sosial ekonomi/budaya dan eksklusi keuangan. Dengan menggunakan data survey US dari kumpulan data PSID. Penelitian ini menggunakan model probit. Dalam penelitian ini variabel kontrol yang digunakan adalah usia, gender, status, pekerjaan, kesehatan, tingkat pendidikan, lokasi tempat tinggal (perkotaan atau pedesaan). Hasilnya menunjukkan bahwa banyak dari variabel demografi dan latar belakang seseorang sangat berkorelasi dengan alternatif pengukuran eksklusi keuangan. Hasil yang signifikan mempengaruhi juga adalah ras, pendapatan rumah tangga, status kesehatan. Lalu diikuti oleh umur dan tingkat pendidikan. Selanjutnya ditemukan pula bahwa agama memiliki hubungan yang rendah terhadap eksklusi keuangan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni karakteristik proksi variabel inklusi keuangan yang diukur dengan menyatukan tiga indikator keinklusifan layanan system keuangan menjadi nilai *single value* yang dapat merepresentasikan tingkat keinklusifan dan dapat dibandingkan antar wilayah serta dapat melihat perkembangan tingkat inklusi keuangan dari waktu ke waktu. Karena pada penelitian sebelumnya, para peneliti menggunakan variabel yang diduga bisa mencerminkan tingkat keinklusifan layanan sistem keuangan dengan beberapa variabel secara terpisah. Hal itu akan menyulitkan interpretasi saat ingin membandingkan tingkat inklusi keuangan antar wilayah ataupun antar waktu. Selain itu penggunaan proksi inklusi keuangan dengan menghitung indeks

inklusi keuangan masih sangat jarang diteliti khususnya untuk studi kasus wilayah Indonesia.

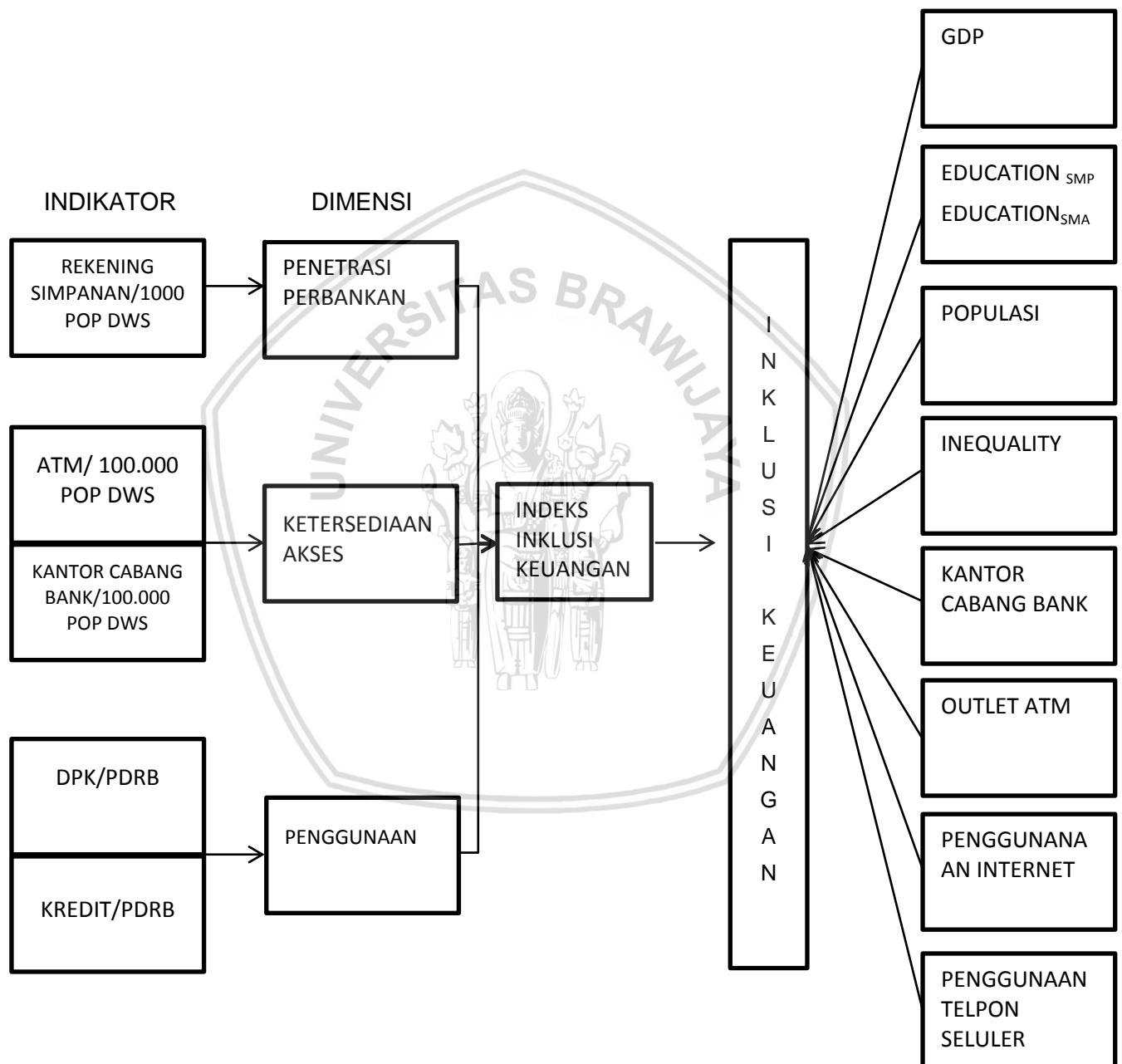
Topik inklusi keuangan juga merupakan topik yang baru dan unik sebagai bahan penelitian dikarenakan penelitian terkait inklusi keuangan akan dapat memberikan informasi yang mungkin dapat digunakan dalam menilai keadaan layanan sistem keuangan terkhususnya di Indonesia untuk dijadikan referensi pengambilan kebijakan yang tepat.



2.3 Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, secara ringkas penelitian ini akan digambarkan sebagai berikut;

Gambar 2.2: **Kerangka Pikir Penulisan**



Sumber: Penulis, 2018

Berdasarkan gambaran kerangka pikir diatas, dalam penelitian ini berusaha mengidentifikasi kembali faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi peningkatan inklusi keuangan di Wilayah Regional Indonesia.

Penelitian ini berusaha mengidentifikasi pengaruh variabel GDP per kapita, tingkat pendidikan (Education) terakhir populasi dewasa dalam hal ini diwakilkan oleh jenjang pendidikan terakhir SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat ke atas yang ditempuh oleh populasi dewasa, perkembangan populasi dewasa, tingkat ketimpangan pendapatan, ketersediaan jaringan kantor cabang bank, outlet ATM, penggunaan internet dan terakhir adalah variabel penggunaan telpon genggam yang diduga memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.

Dengan menggunakan perhitungan indeks inklusi keuangan berdasarkan pengembangan perhitungan yang dirumuskan oleh Sarma (2012). Dimana untuk membangun suatu nilai tunggal dari indeks inklusi keuangan, terdapat tiga dimensi yang secara bersama-sama membentuk indeks inklusi keuangan. Dimensi tersebut meliputi dimensi penetrasi perbankan, dimensi ketersediaan akses infrastuktur dan terakhir dimensi penggunaan produk-produk perbankan.

Dimensi penetrasi perbankan diindikasikan oleh data jumlah rekening simpanan pada bank umum konvensional per 100,000 populasi dewasa. Selanjutnya dimensi ketersediaan akses keuangan akan diukur oleh data jaringan kantor cabang dan outlet ATM bank umum konvensional per 100,000 populasi dewasa. Dan yang terakhir adalah dimensi penggunaan produk perbankan yang diwakilkan oleh data volume kredit dan DPK per PDRB masing-masing provinsi di Indonesia. Ketiga dimensi tersebut bersama-sama membangun indeks inklusi keuangan. Hasil perhitungan indeks inklusi keuangan

yang berupa *single value* akan menjadi proksi dari tingkat keinklusan layanan sistem keuangan di Indonesia.

2.4 Hipotesis

- 1) Diduga tingkat pendapatan masyarakat memiliki pengaruh signifikan positif terhadap peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.
- 2) Diduga tingkat pendidikan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.
- 3) Diduga pula jumlah penduduk yang bisa dianggap sebagai pangsa pasar industri perbankan untuk menyalurkan penjualan produk-produk keuangan akan dapat mempengaruhi peningkatan inklusi keuangan.
- 4) Diduga tingkat ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap tingkat inklusi keuangan di Indonesia.
- 5) Diduga variabel jaringan kantor cabang bank di suatu wilayah memiliki pengaruh signifikan positif terhadap inklusi keuangan di Indonesia.
- 6) Diduga pula variabel ATM berpengaruh signifikan positif terhadap inklusi keuangan di regional Indonesia.
- 7) Diduga variabel akses internet memiliki pengaruh signifikan positif terhadap inklusi keuangan di Indonesia .
- 8) Diduga variabel pengguna telepon seluler memiliki pengaruh signifikan positif terhadap inklusi keuangan di regional Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan jenis data sekunder yang bersumber dari situs resmi pemerintahan dalam hal ini dari web Bank Indonesia (www.bi.go.id), BPS (www.bps.go.id) dan Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id). Penelitian ini juga berlandaskan pada studi literasi terdahulu terkait inklusi keuangan di beberapa negara ataupun kelompok negara.

3.2 Variabel Penelitian, Definisi Operasional dan Sumber Data

Dalam sub bab ini, mencakup deskripsi dari variabel yang digunakan dalam penelitian. Sebelum penjelasan terkait variabel penelitian, terlebih dahulu disajikan tabel deskripsi komponen indikator variabel inklusi keuangan. Pasalnya nilai variabel inklusi keuangan yang dijadikan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini harus dihitung terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai proksi variabel tersebut. Dimana dalam penelitian ini proksi variabel inklusi keuangan adalah nilai indeks inklusi keuangan yang dihitung dari tiga dimensi.

Tabel 3.1 menguraikan komponen pengukuran indikator indeks inklusi keuangan. Dimana dalam penelitian ini indikator indeks inklusi keuangan akan dihitung berdasarkan nilai dari tiga dimensi yaitu; pertama, dimensi penetrasi perbankan yang akan diproksikan oleh jumlah akun rekening perbankan umum konvensional/1,000 populasi dewasa di masing-masing provinsi. Selanjutnya dimensi kedua yaitu dimensi ketersediaan atau *availability* yang diproksikan oleh

data persebaran kantor cabang dan outlet ATM bank umum konvensional/100,000 populasi dewasa di masing-masing provinsi, dan yang terakhir yaitu dimensi penggunaan yang akan diprosikan oleh data porsi total kredit dan DPK perbankan umum konvensional terhadap nilai PDRB. Ringkasan perhitungan indikator indeks inklusi keuangan disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.1: **Perhitungan Indikator Indeks Inklusi Keuangan**

No	Dimensi	Indikator	Perhitungan	Sumber
1	(d1) Penetrasi perbankan	Akun rekening perbankan umum konvensional	$= \frac{\text{Jumlah rekening perbankan (tahun } t)}{\text{jumlah populasi dewasa (tahun } t)} \times 1000$	www.ojk.go.id
2	(d2) Ketersediaan	Jaringan Kantor perbankan umum konvensional	$= \frac{\text{Total Kantor Layanan Bank (tahun } t)}{\text{total penduduk dewasa (tahun } t)} \times 100.000$	www.bi.go.id (SPI)
		Outlet ATM BUK	$= \frac{\text{Total outlet ATM (tahun } t)}{\text{total penduduk dewasa (tahun } t)} \times 100.000$	www.ojk.go.id
3	(d3) Penggunaan	Jumlah kredit BUK di sektor swasta	$= \frac{\text{Total penyaluran kredit swasta}}{\text{nilai PDRB rill}} \times 100\%$	www.bi.go.id
		Jumlah DPK BUK	$= \frac{\text{Total DPK}}{\text{nilai PDRB rill}} \times 100\%$	www.bi.go.id

Sumber: Data Diolah Gabriella, 2013

Selanjutnya tabel 3.2 akan mendeskripsikan ringkasan terkait pelabelan dalam persamaan yang dibentuk penelitian ini, definisi variabel yang digunakan dalam penelitian serta keterangan sumber-sumber data diperoleh.

Tabel 3.2 : Definisi Operasional Variabel-Variabel Dalam Penelitian

No	Label	Variabel	Definisi	Sumber
1	FI	Inklusi Keuangan	Data perhitungan indeks inklusi keuangan dengan menggunakan metode Sarma. Dimana perhitungan indeks inklusi keuangan terdiri dari indikator tiga dimensi yaitu penetrasi perbankan, ketersediaan akses dan penggunaan layanan produk perbankan	Hasil perhitungan penulis, dengan rumus yang dikembangkan oleh Sarma (2012)
2	INCOME	Pendapatan Rill Perkapita Masyarakat	Nilai rill pendapatan per kapita masyarakat (Rp). (ADHK tahun 2010)	www.bps.go.id
3	EDU	Tingkat pendidikan	Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan pemuda (16-30 tahun) adalah jenjang pendidikan tertinggi yang sudah ditamatkan oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi. Meliputi Persentase jenjang pendidikan SMP/ sederajat dan SMA sederajat Keatas. (%)	www.bps.go.id
4	POP	Jumlah Populasi	Persentase perkembangan jumlah populasi dewasa (> 15 tahun) (%)	www.bps.go.id
5	INEQUALITY	Gini Koefisien	Koefisien gini	www.bps.go.id
6	BRCH*	Jaringan Kantor Cabang Bank Umum Konvensional	Kantor Cabang Bank Umum konvensional per 1000 km ²	www.bi.go.id
7	ATM**	Outlet ATM Bank Umum Konvensional	Outlet ATM Bank Umum konvensional per 1000 km ²	www.ojk.go.id
8	INTRNT	Penggunaan Internet	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir (%)	www.bi.go.id
9	PHONE	Pengguna Telpn seluler	Persentase Penduduk yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler (%)	www.bps.go.id

Sumber: Data Diolah, 2018

$$\text{Ket: } *BRCH = \frac{\text{jumlah kantor BUK (tahun } t \text{ pada provinsi } i)}{\text{luas wilaya (tahun 2016 pada provinsi } i)} \times 1000 \text{ Km}^2$$

$$**ATM = \frac{\text{jumlah outlet ATM BUK (tahun } t \text{ pada provinsi } i)}{\text{luas wilaya (tahun 2016 pada provinsi } i)} \times 1000 \text{ Km}^2$$

3.3 Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data nasional yang berfokus pada analisis perkembangan variabel setiap provinsi di Indonesia dengan mengecualikan Provinsi Kalimantan utara, terkait keterbatasan data yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara.

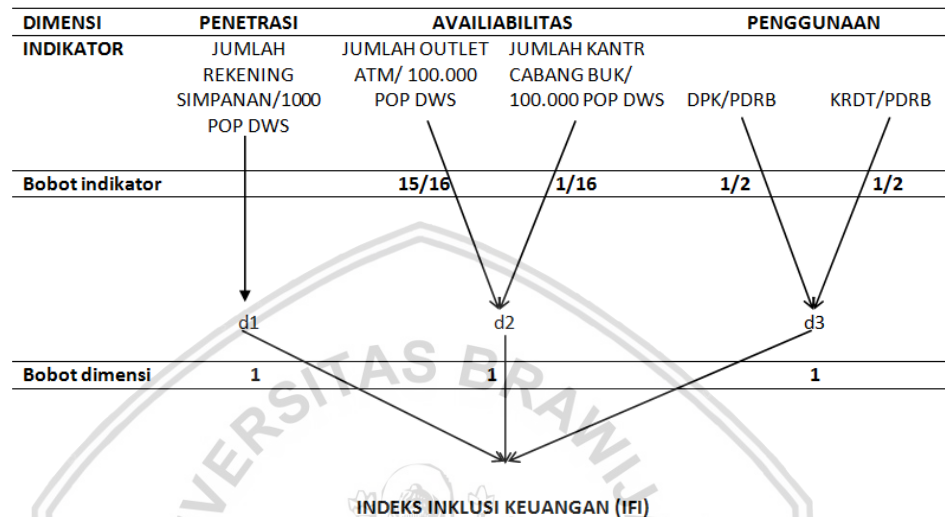
Data meliputi 33 provinsi di seluruh Indonesia. Provinsi-provinsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah provinsi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua.

Rentang waktu dalam penelitian ini adalah dari tahun 2012-2015, yang merupakan data periode tahunan. Penelitian ini berfokus pada periode setelah kebijakan inklusi keuangan ditargetkan oleh pemerintah sebagai kebijakan prioritas yakni dimulai pada tahun 2010. Oleh karenanya periode dalam penelitian diambil setelah tahun 2010. Disamping itu keterbatasan data terkait variabel penggunaan telepon seluler dan internet yang hanya tersedia mulai dari tahun 2012-2015 membuat variabel lainnya menyesuaikan dengan keterbatasan data tersebut. Sehingga pada akhirnya periode penelitian ini mencakup tahun 2012-2015 saja.

3.4 Teknik Analisis Data

3.4.1 Perhitungan Indeks Inklusi Keuangan

Gambar 3.1: Alur Perhitungan Indeks Inklusi Keuangan



Sumber : Data Diolah, 2018

Menggunakan metode Sarma Perhitungan nilai masing-masing dimensi sbb:

$$di = wi \frac{Ai - mi}{Mi - mi}$$

(1)

Dimana :

w_i = pembobotan untuk dimensi i

A_i = nilai actual dari dimensi i

m_i = batas bawah (nilai minimum) dari dimensi i

M_i = batas atas (nilai maksimum) dari dimensi i

a) Penentuan nilai batas atas (M_i) dan batas bawah (m_i) setiap dimensi

Penentuan batas atas dan batas bawah sangat penting dalam proses normalisasi nilai setiap dimensi agar nilai setiap dimensi (d_i) nantinya selalu berada dalam posisi 0 dan w_i . Untuk itu sangat penting menetapkan nilai M_i dan m_i agar bernilai sama/tetap untuk setiap tahunnya. Jadi IFI dihitung untuk tahun dan wilayah yang berbeda dengan nilai *benchmark* yang sama dari masing-masing dimensi.

Dimana nilai m_i sebagai batas bawah ditetapkan bernilai 0 untuk semua dimensi. Sedangkan nilai M_i bisa saja merupakan nilai tertinggi dari data yang tersedia. Namun dalam hal ini bisa terdapat dua masalah. Yang pertama, data tertinggi secara empiric bisa saja menjadi data "outlier", masalah tersebut akan membuat rusaknya skala indeks yang ditentukan, selain itu data maksimum yang outlier, bila digunakan akan membuat nilai IFI wilayah atau negara lain rendah, walaupun sebenarnya performa layanan sistem keuangan mereka mungkin saja bagus. Masalah kedua, saat menggunakan data maksimum yang outlier sebagai batas atas, dimana harusnya nilainya berbeda-beda untuk setiap tahunnya dan akan menyulitkan bila membandingkan indeks tersebut antar waktu.

Untuk itu setiap data observasi harus diuji outlier terlebih dahulu. Jika ada indikasi data observasi yang outlier maka untuk menentukan nilai batas atas (M_i) dilakukan perhitungan

rata-rata kecenderungan 90 persentil distribusi data untuk masing-masing dimensi.

Dalam penelitian ini, semua data observasi masing-masing dimensi dimana nilai observasi tertinggi merupakan nilai yang outlier. Sehingga data M_i yang digunakan adalah data hasil perhitungan 90 persentil. Untuk itu semua data yang outlier harus diganti dengan data 90 persentil tersebut.

b) Penentuan bobot setiap dimensi

Dalam penelitian ini, pembobotan yang digunakan berdasarkan penelitian Sarma (2012) yang telah diaplikasikan juga dalam penelitian Sanjaya (2014), dimana bobot untuk setiap dimensi bernilai sama yakni $w(d_1, d_2, d_3) = 1$.

Jadi dari penentuan pembobotan tersebut, dapat disajikan bahwa daerah i pada titik (d_{1i}, d_{2i}, d_{3i}) tiga dimensi masing-masing berada pada: dimensi penetrasi $0 \leq d_1 \leq 1$, dimensi ketersediaan $0 \leq d_2 \leq 1$, dimensi penggunaan $0 \leq d_3 \leq 1$. Dimana $(0,0,0)$ merupakan nilai terburuk dari setiap dimensi dan titik $(1,1,1)$ merupakan titik ideal atau optimal dari masing-masing dimensi di setiap wilayah.

Selain menentukan pembobotan dimensi, pembobotan terkait indikator penyusun dimensi juga diperhitungkan berdasarkan metode Sarma (2012). Dimana jika terdapat lebih dari satu indikator untuk menghitung nilai tunggal dimensi, pembobotan indikator dihitung berdasarkan rata-rata rasio dari indikator-indikator yang digunakan dalam perhitungan nilai tunggal dimensi tersebut.

Setelah menyelesaikan tiga dimensi, dimensi nilai tunggal (*single value dimension*) akan ditempatkan antara 0 dan w_i ($0 \leq d_i \leq w_i$).

Nilai dimensi_{*i*} yang mendekati w_i menunjukkan area dengan capaian tertinggi pada dimensi_{*i*}.

Selanjutnya menentukan nilai X_1 yang merupakan jarak normalitas Eclidean X dari titik terendah 0, sedangkan X_2 merupakan jarak normalitas X dengan titik ideal w . IFI akan diproses dengan menggunakan rumus di bawah ini.

$$X_1 = \frac{\sqrt{d_1^2 + d_2^2 + d_3^2}}{\sqrt{w_1^2 + w_2^2 + w_3^2}} \quad (2)$$

$$X_2 = 1 - \frac{\sqrt{(w_1 - d_1)^2 + (w_2 - d_2)^2 + (w_3 - d_3)^2}}{\sqrt{w_1^2 + w_2^2 + w_3^2}} \quad (3)$$

Jadi IFI merupakan rata-rata sederhana dari X_1 dan X_2

$$IFI = \frac{1}{2} [X_1 + X_2] \quad (4)$$

Nilai indeks dari setiap dimensi terletak antara 0 dan w_i . Nilai d_i yang lebih tinggi mengindikasikan lebih banyak titik ideal pada dimensi ke i . Titik $X = (d_1, d_2, d_3)$ menunjukkan pencapaian inklusi keuangan pada sebuah provinsi. Kemudian pada ruang dimensi, point $O = (0, 0, 0)$ merepresentasikan situasi yang terburuk, sedangkan titik $W = (w_1, w_2, w_3)$ – di mana w_1, w_2 , dan w_3 adalah bobot setiap dimensi – yang mewakili situasi paling ideal untuk seluruh dimensi.

Dengan titik $W = (1, 1, 1)$, maka rumus akhir dari IFI adalah

$$IFI = \frac{1}{2} \left[\frac{\sqrt{d_1^2 + d_2^2 + d_3^2}}{\sqrt{3}} + \left(1 - \frac{\sqrt{(1-d_1)^2 + (1-d_2)^2 + (1-d_3)^2}}{\sqrt{3}} \right) \right] \quad (5)$$

Penelitian ini menggunakan tiga dimensi untuk mengukur Indeks Inklusi Keuangan (Index of Financial Inclusion) yang terdiri dari aksesibilitas (d1), availabilitas (d2), dan penggunaan (d3).

3.4.2 Model Analisis

Dalam penelitian ini model analisis yang digunakan adalah model analisis panel data. Yang secara umum persamaan model panel data dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \alpha_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \dots \beta_n X_{nit} + \mu_{it}$$

Dimana :

- Y = variabel dependen.
- X1, X2, X3..Xn = variabel independen
- β_0 = constanta
- α_i = variabel unobservasi
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_n$ = nilai koefisien masing masing variabel independen
- μ = nilai error
- it = melambangkan jenis data panel

3.4.2.1 Pemilihan Model Panel Data

Dalam analisis regresi panel data, terdapat tiga metode yang bisa digunakan untuk mengestimasi model regresi panel data, yaitu Model *Pooled Least Square* (PLS), Model *Fix Efek* (FEM) dan Model *Random* (REM).

3.4.2.2 Pemilihan Model Panel Data Terbaik

- a) Uji likelihood (Redundant Fixed Effects Tests), uji ini digunakan untuk menentukan pilihan model terbaik antara model *pooled least square* atau *fixed effect*.

Hipotesis uji likelihood;

H_0 ; model pooled lebih baik

H_a : model fixed effect lebih baik

Dasar pengambilan keputusan ;

- 1) Jika nilai prob chi-square < dari alfa (0.05) maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
 - 2) Jika nilai prob chi-square > dari alfa (0.05) maka H_0 diterima dan H_a ditolak
- b) Uji haustmant, uji ini digunakan untuk memilih permodelan yang terbaik antara metode panel data *fixed effect* atau *Random effect*.

Hipotesis uji haustmant sbb;

H_0 ; model random effect lebih baik

H_a ; model fixed effect lebih baik

Dasar pengambilan keputusan ;

- 1) Jika nilai prob chi-square < dari alfa (0.05) maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- 2) Jika nilai prob chi-square > dari alfa (0.05) maka H_0 diterima dan H_a ditolak

3.4.3 Pengujian Asumsi Klasik

3.4.3.1 Pengujian Normalitas

Asumsi normalitas adalah setiap nilai μ_i (error) dapat terdistribusi secara normal, artinya:

Rata-rata: $E(\mu_i)=0$

Varians: $E(\mu_i)^2 = \sigma^2$. Atau dapat dituliskan $\mu_i \sim N(0, \sigma^2)$.

Pengujian normalitas data bisa dilihat dari nilai probabilitas jarque-bera. Dimana:

Hipotesis;

H_0 ; residual memiliki distribusi normal

H_a ; residual tidak terdistribusi normal

Dasar pengambilan keputusan ;

- 1) Jika nilai prob chi-square < dari alfa (0.05) maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- 2) Jika nilai prob chi-square > dari alfa (0.05) maka H_0 diterima dan H_a ditolak

3.4.3.2 Multikolinearitas

Merupakan masalah dimana data memiliki hubungan linear yang “sempurna” antar variabel independennya dalam sebuah permodelan regresi. Untuk regresi variabel k yang melibatkan variabel penjelas $X_1, X_2, X_3, X_n \dots$ (dimana $X_1 = 1$ untuk semua observasi mengikuti faktor intercept), dikatakan terdapat hubungan linear “sempurna” jika terjadi kondisi sbb:

$$\lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2 + \lambda_3 X_3 + \dots + \lambda_n X_n = 0$$

Dimana $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ adalah konstanta

3.4.3.3 Autokorelasi

Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi kelambanan suatu deretan tertentu dengan dirinya sendiri. Atau secara sederhana dapat dikatakan autokorelasi merupakan masalah asumsi kalsik dimana terdapat korelasi antar observasi untuk periode yang berbeda. Atau juga merupakan suatu kondisi dimana sifat residual regresi saling berkaitan antara satu observasi ($ke-i$) dengan observasi yang lain ($ke-j$) (Wahyudi, 2016).

Dapat dituliskan sbb: $E(\epsilon_i, \epsilon_j) \neq 0; i \neq j$.

Autokorelasi dapat dideteksi dengan melihat nilai Durbin-Watson. Jika:

- $0 < d < d_L$: terdapat autokorelasi positif
- $d_L < d_W < d_U$: daerah ragu-ragu
- $d_U < d < 4 - d_U$: tidak terdapat autokorelasi
- $4 - d_U < d < 4 - d_L$: daerah ragu-ragu
- $4 - d_L < d < 4$: terdapat autokorelasi negatif

3.4.3.4 Heteroskedastisitas

Masalah yang timbul akibat nilai variance μ adalah σ^2 , yang menunjukan nilai variance error bervariasi dari satu observasi ke observasi lainnya, ataudengan kata lain nilai variance error tidak konstan. Secara umum heteroskedastisitas dapat digambarkan sebagai berikut :

$$E(\mu_{it}^2) = \sigma_{it}^2$$

3.4.4 Pengujian Data Panel

$$FI_{it} = \beta_0 + \beta_1 INCOME_{it} + \beta_2 EDU_{SMPit} + \beta_2 EDU_{SMAit} + \beta_4 POP_{it} - \beta_5 INEQUALITY_{it} + \beta_6 BRCH_{it} + \mu_{it} \quad (1)$$

$$FI_{it} = \beta_0 + \beta_1 INCOME_{it} + \beta_2 EDU_{SMPit} + \beta_2 EDU_{SMAit} + \beta_4 POP_{it} - \beta_5 INEQUALITY_{it} + \beta_7 ATM_{it} + \mu_{it} \quad (2)$$

$$FI_{it} = \beta_0 + \beta_1 INCOME_{it} + \beta_2 EDU_{SMPit} + \beta_2 EDU_{SMAit} + \beta_4 POP_{it} - \beta_5 INEQUALITY_{it} + \beta_8 INTRNT_{it} + \mu_{it} \quad (3)$$

$$FI_{it} = \beta_0 + \beta_1 INCOME_{it} + \beta_2 EDU_{SMPit} + \beta_2 EDU_{SMAit} + \beta_4 POP_{it} - \beta_5 INEQUALITY_{it} + \beta_9 PHONE_{it} + \mu_{it} \quad (4)$$

KET :

β_0 = nilai constanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7, \beta_8, \beta_9$ = merupakan nilai koefisien dari masing-masing variabel independent yaitu variabel pendapatan per kapita masyarakat tingkat Pendidikan SMP dan SMA, perkembangan jumlah penduduk, variabel tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat, variabel kantor cabang bank, ATM, penggunaan telpon seluler dan terakhir koefisien variabel penggunaan internet

μ = nilai error

it = menunjukkan data panel yang menggabungkan data crossection dan time series

3.4.4.1 Uji Koefisien Regresi secara Simultan (Uji F)

Uji hipotesis dengan F hitung digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama – sama terhadap variabel terikat yaitu tingkat inklusi keuangan

Hipotesis ;

$H_0; \beta_1=\beta_2=\beta_3=\beta_4=\beta_5=\beta_6=\beta_7=\beta_8=\beta_9= 0$ Yaitu seluruh variabel bebas secara bersama-sama tidak mempengaruhi besaran nilai variabel terikat dalam hal ini adalah tingkat inklusi keuangan

$H_a; \beta_1\neq\beta_2\neq\beta_3\neq\beta_4\neq\beta_5\neq\beta_6\neq\beta_7\neq\beta_8\neq\beta_9\neq 0$ Yaitu seluruh variabel bebas secara-bersama-sama mempengaruhi tingkat inklusi keuangan

Dasar pengambilan keputusan ;

- 1) jika probabilitas uji $F < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- 2) jika probabilitas uji $F > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

3.4.4.2 Uji Koefisien Determinasi (Adj R Square)

Uji koefisien determinasi ditunjukan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independent menjelaskan variasi variabel dependenyaitu tingkat inklusi keuangan. Nilai koefisien determinasi yang biasa dipakai adalah adjusted R square.

3.4.4.3 Uji secara Parsial (Uji t)

Hipotesis dengan uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas memiliki pengaruh signifikan atau tidak dengan variabel terikat secara individu atau parsial untuk setiap variabel.

Hipotesis;

- uji t untuk variabel perubahan tingkat pendapatan perkapita masyarakat

Ho; $\beta_1 = 0$, nilai perubahan tingkat pendapatan perkapita masyarakat tidak berpengaruh secara parsial terhadap indeks inklusi keuangan

Ha; $\beta_1 \neq 0$, tingkat pendapatan perkapita masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap inklusi keuangan

- uji t untuk variabel tingkat pendidikan masyarakat (jenjang SMP/ sederajat)

Ho; $\beta_2 = 0$, tingkat pendidikan SMP/ sederajat yang ditamatkan masyarakat tidak berpengaruh secara parsial terhadap inklusi keuangan

Ha; $\beta_2 \neq 0$, tingkat pendidikan SMP/ sederajat yang ditamatkan masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap inklusi keuangan

- uji t untuk variabel tingkat pendidikan masyarakat (jenjang SMA/ sederajat ke atas)

Ho; $\beta_3 = 0$, tingkat pendidikan SMA/ sederajat ke atas yang ditamatkan masyarakat tidak berpengaruh secara parsial terhadap inklusi keuangan

Ha; $\beta_3 \neq 0$, tingkat pendidikan SMA/ sederajat ke atas yang ditamatkan masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap inklusi keuangan

- uji t untuk variabel perkembangan populasi

Ho; $\beta_4 = 0$, perkembangan populasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap inklusi keuangan

Ha; $\beta_4 \neq 0$, perkembangan populasi berpengaruh secara parsial terhadap inklusi keuangan.

- uji t untuk variabel ketimpangan pendapatan

Ho; $\beta_5 = 0$, ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh secara parsial terhadap inklusi keuangan

Ha; $\beta_5 \neq 0$, ketimpangan pendapatan berpengaruh secara parsial terhadap inklusi keuangan.

- uji t untuk variabel Kantor Cabang Bank

Ho; $\beta_6 = 0$, Kantor Cabang Bank tidak berpengaruh secara parsial terhadap inklusi keuangan

Ha; $\beta_6 \neq 0$, Kantor Cabang Bank berpengaruh secara parsial terhadap inklusi keuangan

- uji t untuk variabel ATM

Ho; $\beta_7 = 0$, ATM tidak berpengaruh secara parsial terhadap inklusi keuangan

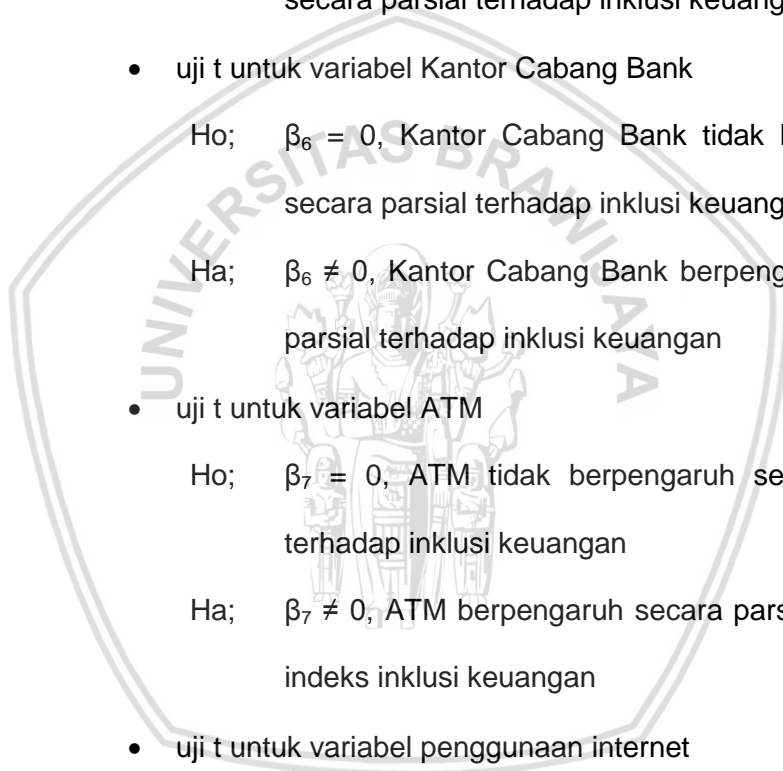
Ha; $\beta_7 \neq 0$, ATM berpengaruh secara parsial terhadap indeks inklusi keuangan

- uji t untuk variabel penggunaan internet

Ho; $\beta_8 = 0$, penggunaan internet tidak berpengaruh secara parsial terhadap inklusi keuangan

Ha; $\beta_8 \neq 0$, pengguna internet berpengaruh secara parsial terhadap indeks inklusi keuangan

- uji t untuk variabel penggunaan telpon seluler

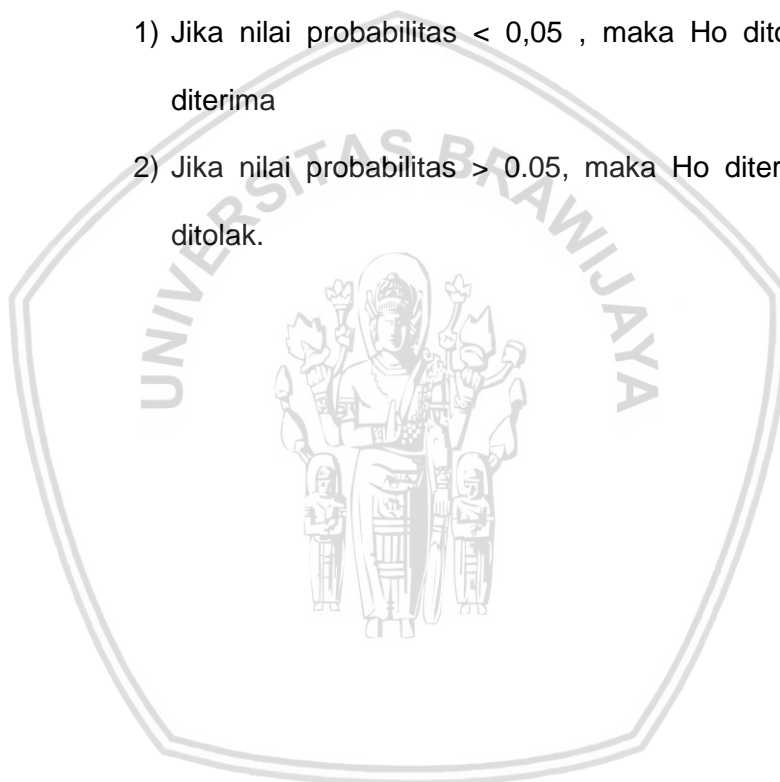


H_0 ; $\beta_9 = 0$, penggunaan telpon seluler tidak berpengaruh secara parsial terhadap inklusi keuangan

H_a ; $\beta_9 \neq 0$, penggunaan telpon seluler berpengaruh secara parsial terhadap indeks inklusi keuangan

Dasar pengambilan keputusan

- 1) Jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- 2) Jika nilai probabilitas > 0.05 , maka H_0 diterima dan H_a ditolak.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL

Tabel 4.1 akan mendeskripsikan secara singkat terkait data-data variable yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 4.1: Deskripsi Secara Statistik Data Penelitian

Variabel	Mean	Median	Max	Min	Stdv	Obs
FI	0.5904	0.556785	1	0.30023	0.149472	132
GDP/kapita (ribu rupiah)	35228.4	26752.47	142892.2	10030.98	28373.52	132
EDUSMP(%)	35.815	30.4500	67.9700	19.460	12.3205	132
EDUSMA(%)	41.877	40.2500	66.3000	25.790	9.4553	132
INEQUALITY	0.3750	0.3720	0.4590	0.2880	0.0394	132
POP (%)	1.98	2.11	5.03	-12.6	1.45	132
BRCH	29.177	1.7450	864.45	0.1755	145.12	132
ATM	837.567	19.0947	28127.59	1.6519	4282.582	132
INTRNT (%)	16.1730	14.6250	46.6300	5.2500	7.4529	132
PHONE (%)	50.6898	50.1300	76.9300	23.9700	10.2229	132

Sumber: Eviews, 2018

Dari tabel 4.1 terlihat beberapa ringkasan deskriptif data meliputi nilai rata-rata hingga nilai maximum dan minimum data yang dapat digunakan sebagai gambaran secara ringkas. Serta jumlah observasi yang digunakan dalam penelitian ini, dimana jumlah seluruh data yang digunakan adalah sebanyak 132 data dengan jumlah data cross-section sebanyak 33.

Pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata indeks inklusi keuangan secara keseluruhan data pada seluruh provinsi di Indonesia berada pada nilai 0.590365. Yang berarti berdasarkan beberapa literature, kriteria indikasi inklusi keuangan digolongkan *middle* jika nilai indeks inklusi keuangan berada pada *range* kurang dari 0.6. Secara umum dapat dilihat bahwa data indeks inklusi keuangan nilai maksimumnya sebesar 1 yang artinya terdapat suatu wilayah provinsi di Indonesia yang di indikasi memiliki tingkat inklusifitas layanan sistem keuangan yang sangat tinggi. Sedangkan Nilai minimum mengindikasikan terdapat suatu provinsi di Indonesia yang memiliki indeks inklusifitas layanan sistem keuangan yang paling rendah dibandingkan dengan wilayah provinsi lainnya di Indonesia.

Dari hasil deskripsi data-data yang digunakan pada table 4.1 terlihat bahwa tingkat standar deviasi dari beberapa variabel seperti GDP per kapita, BRCH, dan ATM sangat tinggi. Hal ini membuat model yang digunakan dalam penelitian mengalami transformasi pada beberapa variabel untuk mengurangi tingkat keberagaman variance data.

4.1.1 Hasil Perhitungan Indeks Inklusi Keuangan

Perlu diketahui bahwa dalam hasil perhitungan indeks inklusi keuangan ini, data maksimum dari setiap dimensi tidak dapat digunakan sebagai nilai batas atas (M_i) dalam perhitungan nilai masing-masing dimensi. Pasalnya nilai maksimum dari data indikator setiap dimensi merupakan data yang outlier. Hasil perhitungan komponen M_i yang telah di normalisasikan dengan mengambil nilai maksimum dari 90% kelompok data indikator masing-masing dimensi, terlihat dalam tabel 4.2.

Table 4.2: Deskripsi Perhitungan Indikator Indeks Inklusi Keuangan

Dimensi	W dimensi	Indikator	W indikator*	m ₀	Mi
Aksesibilitas (d ₁)	1	Jumlah rekening	1	0	1231.97
Availabilitas (d ₂)	1	Kantor cabang bank	1/16	0	4,167
		ATM	15/16	0	70,13
Usage (d ₃)	1	Kredit/PDRB	½	0	39,10%
		DPK/PDRB	½	0	45,10%

Sumber: Microsoft excel, 2018

$$*Ket: w \text{ (indikator } d_2; d_3) = \frac{\text{rata-rata ATM}}{\text{rata-rata Kantor Cabang Bank}}; \frac{\text{rata-rata Kredit/PDRB}}{\text{rata-rata DPK/PDRB}}$$

Seperti yang sudah dijelaskan diawal, terkait penentuan bobot setiap dimensi. Menghitung indeks inklusi keuangan berlandaskan pada penelitian yang dilakukan oleh Sarma (2012). Dalam artikel Sarma, keputusan dalam pemberian bobot dimensi hanya berdasarkan pada seberapa penting nilai suatu dimensi dapat berkontribusi terhadap pembentukan nilai indeks inklusi keuangan.

Sedangkan penentuan nilai m₀ ditetapkan bernilai 0. Berdasarkan hasil penulisan Sarma (2012), dimana titik terburuk dari kondisi setiap dmensi adalah harusnya 0.

Table 4.2 menyajikan hasil perhitungan nilai maksimum dari masing-masing indeks yang nantinya akan digunakan untuk membentuk nilai *single value* indeks inklusi keuangan.

Nilai Mi untuk dimensi aksesibilitas yang diprosikan oleh jumlah rekening/1000 populasi dewasa sebesar 1231.97 artinya bahwa nilai tertinggi kepemilikan akun rekening di suatu daerah berdasarkan kecendrungan 90% kelompok data yaitu terdapat 1,2 rekening untuk

setiap orang dewasa dalam daerah tersebut atau dapat dikatakan, nilai maksimum kepemilikan rekening di suatu wilayah provinsi di Indonesia hanya terdapat 1 rekening akun bank saja untuk setiap orang dewasa.

Selanjutnya dimensi *avaliabilitas* yang dimana nilai M_i untuk kantor cabang bank/100.000 populasi dewasa hanya sebesar 4,2 kantor cabang perbankan umum konvensional yang tersedia untuk setiap 100.000 populasi dewasa di suatu wilayah berdasarkan kecenderungan 90% kelompok data. Atau dengan kata lain terdapat 1 kantor cabang bank untuk 25.000 orang dewasa di suatu provinsi di Indonesia. Sedangkan untuk M_i indikator ATM sebesar 70 outlet yang tersedia untuk setiap 100.000 populasi dewasa. Atau dengan kata lain terdapat 1 outlet ATM untuk 1.428 populasi dewasa di suatu provinsi di Indonesia. Pembobotan indikator ATM dan cabang bank yang mana merupakan hasil perhitungan rasio rata-rata ATM per cabang bank menunjukkan bahwa rata-rata sebanyak 15 ATM untuk 1 Kantor cabang bank.

Yang terakhir adalah dimensi *usage* yang diprosikan oleh porsi kredit per PDRB dan DPK masing-masing provinsi. Nilai M_i sebesar 39,10%. Artinya nilai total penyaluran kredit maksimal berdasarkan kecendrungan 90% kelompok data seluruh provinsi di Indonesia, porsi penyaluran kredit hanya sebesar 39% dari PDRB. Sedangkan untuk volume penghimpunan DPK, nilai maksimum suatu provinsi di Indonesia sebesar 45,10% dari total PDRB. Nilai penyebaran penggunaan produk perbankan tersebut masih kurang dari 50% dari nilai PDRB secara rata-rata. Indikasi rasio rata-rata kredit/DPK yaitu sebesar $\frac{1}{2}$. Dimana nilai penghimpunan DPK dan penyaluran kredit sama-sama memiliki bobot kontribusi yang seimbang.

Tabel 4.3: Hasil Perhitungan Indeks Inklusi keuangan Tingkat Provinsi di Indonesia tahun 2012-2015

NO	PROVINSI	IFI w(1,1,1)				Rata-Rata Indeks Inklusi Keuangan	Rank
		2012	2013	2014	2015		
1	_ACEH	0,431	0,527	0,572	0,627	0,539	20
2	_SUMUT	0,581	0,671	0,729	0,757	0,685	6
3	_SUMBAR	0,471	0,549	0,581	0,620	0,555	17
4	_RIAU	0,403	0,476	0,523	0,551	0,488	27
5	_JAMBI	0,389	0,478	0,518	0,552	0,484	28
6	_SUMSEL	0,434	0,508	0,543	0,568	0,513	24
7	_BENGKULU	0,454	0,524	0,568	0,620	0,542	19
8	_LAMPUNG	0,300	0,365	0,387	0,418	0,367	33
9	_KEP_BANGKA	0,459	0,536	0,579	0,615	0,547	18
10	_KEP_RIAU	0,758	0,818	0,812	0,809	0,799	4
11	_DKI	1	1	1	1	1,000	1
12	_JABAR	0,476	0,570	0,623	0,652	0,580	14
13	_JATENG	0,419	0,505	0,553	0,584	0,515	23
14	_DIY	0,733	0,831	0,886	0,915	0,842	3
15	_JATIM	0,461	0,558	0,616	0,647	0,570	15
16	_BANTEN	0,556	0,664	0,727	0,754	0,675	9
17	_BALI	0,791	0,874	0,889	0,898	0,863	2
18	_NTB	0,362	0,447	0,513	0,535	0,464	31
19	_NTT	0,418	0,506	0,551	0,605	0,520	21
20	_KALBAR	0,484	0,576	0,627	0,686	0,593	13
21	_KALTENG	0,418	0,492	0,527	0,555	0,498	25
22	_KALSEL	0,561	0,666	0,726	0,776	0,682	7
23	_KALTIM	0,618	0,697	0,755	0,751	0,705	5
24	_SULUT	0,513	0,677	0,746	0,789	0,681	8
25	_SULTENG	0,443	0,451	0,490	0,534	0,480	29
26	_SULSEL	0,527	0,636	0,692	0,740	0,649	10
27	_SULTENGARA	0,464	0,469	0,489	0,531	0,488	26
28	_GORONTALO	0,365	0,466	0,490	0,541	0,465	30
29	_SULBAR	0,387	0,426	0,340	0,366	0,380	32
30	_MALUKU	0,452	0,535	0,615	0,663	0,566	16
31	_MALUKU_UTR	0,443	0,528	0,522	0,578	0,518	22
32	_PAPUA_BRT	0,545	0,655	0,617	0,638	0,614	11
33	_PAPUA	0,520	0,604	0,638	0,686	0,612	12
RATA-RATA		0,504	0,584	0,619	0,653		

Sumber: Data Diolah, 2018

Dengan menggunakan metode perhitungan indeks inklusi keuangan yang dikembangkan oleh Sarma (2012), dalam penelitian ini berhasil menghitung besaran indeks inklusi keuangan seluruh provinsi di Indonesia.

Hasilnya menunjukan bahwa DKI Jakarta memiliki rata-rata nilai indeks inklusi keuangan paling tinggi diantara provinsi lainya di Indonesia. Dengan nilai indeks inklusi keuangan rata-rata sebesar 1 yang bisa dikatakan sebagai indikasi keinklusifan layanan keuangan sempurna. Ini dikarenakan nilai-nilai dari indikator penyusun indeks inklusi keuangan DKI Jakarta merupakan yang tertinggi diantara provinsi-provinsi lainya di Indonesia. Data dari semua indikator indeks inklusi keuangan DKI Jakarta merupakan data outlier tertinggi. Sehingga wajar saja jika nilai indeks inklusi keuangan DKI Jakarta sangat tinggi.

Bertentangan dengan indikasi inklusi keuangan di wilayah Papua yang dikategorikan *high financial inclusion* berdasarkan hasil perhitungan data-data makro perbankan. Dimana masing indikator inklusi keuangan dihitung berdasarkan jumlah populasi dewasa di suatu wilayah. Berdasarkan data tersebut wilayaha papua memiliki jumlah populasi dewasa yang rendah sedangkan data jumlah infrastruktur dan produk keuangan cenderung lebih tinggi dari jumlah penduduk. Hal ini menjadi sebuah kelemahan dalam menggunakan data makro perbankan dimana indikasi *double account*, konsentrasi penyaluran produk keuangan masih belum bisa diakomodir dalam perhitungan indeks inklusi keuangan pada penelitian ini.

Secara umum penjelasan mengenai indeks inklusi keuangan dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok provinsi. Dimana kelompok provinsi yang memiliki nilai indeks inklusi kuangan >0.6 tergolong dalam daerah indikasi inklusi keuangan yang tinggi. Adapun provinsi dalam kelompok ini meliputi DKI

Jakarta, Bali, DI Yogyakarta, Kep. Riau, Kalimantan Timur, Sumatra Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi utara, Banten, Sulawesi selatan, papua Barat, dan diposisi terakhir ada provinsi Papua

Sedangkan pada kelompok *middle*, dimana indikasi indeks inklusi keuangan berada pada kisaran 0,3 hingga kurang dari 0,6. Provinsi yang berada dalam kelompok ini yaitu; Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku, Sumatra Barat, Kep. Banka Belitung, Bengkulu, Aceh, NTT, Maluku Utara, Jawa tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Riau, Jambi, Sulawesi Tengah, Gorontalo, NTB, Sulawesi Barat, Lampung.

Untuk kelompok kategori *Low* indeks inklusi keuangan, dimana nilai indeks inklusi keuangan berada dibawah 0,3. Untuk provinsi-provinsi di seluruh Indonesia tidak ada yang masuk kategori *low* indeks inklusi keuangan.

Berdasarkan survey nasional literasi dan indeks inklusi keuangan di indonesia yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2016. Dimana terjadi peningkatan indeks inklusi keuangan di indonesia yang pada tahun 2013 sebesar 59,7% menjadi 67,8% untuk indikasi inklusi keuangan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan hasil perhitungan penulis, dimana secara rata-rata sebagian besar tingkat inklusi keuangan di provinsi-provinsi Indonesia berada pada golongan *High financial Inclusion* dengan rata rata 0.640 atau 64 % untuk 12 provinsi kategori *High Indeks Inclusion*. Sisanya hanya sebanyak 21 provinsi di indonesia yang termasuk dalam kategori *medium Financial Inclusion Indeks* dengan rata-rata 0.457 atau 45,7%.

Jika dirata-ratakan secara keseluruhan, hasil perhitungan indeks inklusi keuangan seluruh provinsi pada rata-rata tahun 2013 sebesar 58,7%, jika

dibandingkan dengan hasil survey OJK untuk tahun 2013 sebesar 59,7% nilai tersebut hampir mirip dengan selisih 1% saja. Karena keterbatasan data sehingga perhitungan indeks inklusi keuangan tidak bisa dihitung untuk tahun 2016.

Namun pola hasil perhitungan data indeks inklusi keuangan per provinsi dipastikan mengalami peningkatan secara terus menerus dari tahun ke tahun. Artinya, dimana jika suatu daerah diindikasikan tingginya indeks inklusi keuangan menunjukkan bahwa kegiatan sektor keuangan mulai dari keterjangkauan layanan, ketersediaan akses hingga penggunaan produk-produk keuangan di daerah tersebut sudah sangat baik menjangkau masyarakat.

4.1.2 Hasil Uji Pemilihan Model Terbaik

Tabel 4.4: Hasil Pengujian Pemilihan Model Terbaik

PEMILIHAN MODEL TERBAIK		PERSAMAAN			
		1	2	3	4
LIKELIHOOD RATIO	Cross-section Chi-square	257.427	268.0833	221.1576	260.7872
	p-value	0	0	0	0
	Keputusan	FIX EFEK	FIX EFEK	FIX EFEK	FIX EFEK
HAUSMAN TES	Chi-sq. statistik	79.4056	90.45605	22.39420	26.35673
	p-value	0	0	0.0001	0.0002
	Keputusan	FIX EFEK	FIX EFEK	FIX EFEK	FIX EFEK

Sumber: Eviews, 2018

Dari hasil pemilihan model terbaik diatas, semua persamaan terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah persamaan dengan model FIX efek. Dikarenakan pada hasil output likelihood test yang membandingkan antara model common efek dengan model fix efek, nilai p-value dari Cross-section Chi-square kurang dari alfa 0,05 maka kesimpulan yang diambil adalah menolak H_0 yang artinya model fix adalah model terbaik dibandingkan dengan model common efek. Selanjutnya pada uji pemilihan model fix efek dibandingkan random efek dengan hausman test, menghasilkan nilai p-value yang lebih kecil dari alfa 0,05. Kesimpulan akhir dari semua pemilihan model terbaik, bahwa model fix efek tetap menjadi model terbaik dibandingkan random efek. Oleh sebab itu seterusnya dalam penelitian ini akan menggunakan regresi data panel dengan model fix efek.

4.1.3 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Tabel 4.5: Ringkasan Hasil Uji Asumsi Klasik

PENGUJIAN ASUMSI KLASIK*	PERSAMAAN			
	1	2	3	4
NORMALITAS	Normal	Normal	Normal	Normal
AUTOKORELASI	-	-	-	-
MULTIKOLINEARITAS	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
HETEROSKEDASTISITAS	Ada	Ada	ada	ada

Sumber: Eviews, 2018

*Ket: output lengkap dari eviws dapat diliat dibagian lampiran

Dalam penelitian ini mengabaikan masalah autokorelasi berdasarkan beberapa refrensi seperti yang dikemukakan oleh Ekananda (2016) bahwa estimator regresi panel data adalah persamaan yang tidak bias dan konsisten (namun tidak BLUE sebagaimana untuk memenuhi estimator

OLS). Regresi panel data mengasumsikan adanya kondisi heterogenitas antar persamaan dan memperhatikan adanya struktur residu yang berbeda antar persamaan. Didukung pula oleh Nacrowi dan Usman (2006), dimana pada model FE masalah autokorelasi dapat diabaikan karena tidak membutuhkan asumsi terbebasnya model dari serial korelasi. Selain itu Gujarati (2012) juga mengatakan hal serupa, dimana pada permodelan data panel, korelasi antar waktu dalam variabel sangat tidak dimungkinkan terjadi.

Hasil dari pengujian asumsi klasik pada panel data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat permasalahan asumsi klasik dalam pembentukan model penelitian. Sehingga model awal tidak dapat digunakan untuk melanjutkan analisis. Permodelan akan diperbaiki terlebih dahulu untuk menghasilkan estimasi yang bersifat BLUE dan bebas dari masalah asumsi klasik tersebut. Sehingga hasil analisis tidak bersifat lancung.

Permasalahan heteroskedastisitas terjadi pada semua persamaan diketahui dari hasil uji glejser. Untuk itu, penanganan dalam regresi data panel untuk semua persamaan dilakukan dengan menggunakan metode GLS dalam hal ini digunakan metode *White Heteroscedasticity Consistent Coefficient Covariance* yakni dengan melakukan koreksi terhadap standar error dari koefisien regresi, (Wahyudi, 2016).

4.1.4 Hasil Uji Statistik Data Panel

Tabel 4.6: Ringkasan Hasil Estimasi Panel Data

HASIL ESTIMASI TAHUN 2012-2015	log IFI W(1,1,1)			
	(1) coeff. (p-values)	(2) coeff. (p-values)	(3) coeff. (p-values)	(4) coeff. (p-values)
VARIABEL INDEPENDEN				
C	-13.79354	-10.59018	-11.76515	-7.530754
log(GDP/ kapita)	1.256454 (0.000)***	0.939014 (0.0001)***	1.060629 (0.0017)***	0.574062 (0.0296)**
EDU SMP sederajat	0.000765 (0.3561)	0.001066 (0.319)	0.000875 (0.2772)	0.000932 (0.6751)
EDU SMA sederajat keatas	0.49628 (0.0487)**	0.541577 (0.0162)**	0.618256 (0.0186)**	0.668411 (0.000)***
INEQUALIY	-0.582178 (0.2218)	-0.522695 (0.2557)	-0.261982 (0.5919)	-0.051629 (0.8999)
POP	-0.36617 (0.1037)	-0.133777 (0.5719)	0.12083 (0.7628)	0.419526 (0.4554)
log(BRCH)	0.446426 (0.0428)**	-	-	-
log(ATM)	-	0.325337 (0.0004)***	-	-
PENGGUNA INTERNET	-	-	0.008862 (0.0948)*	-
PENGGUNA TLPN SLULAR	-	-	-	0.015859 (0.0001)***
R ²	0.932436	0.938832	0.931276	0.939059
ADJUSTED R ²	0.90483	0.913838	0.903195	0.914159
F-TES	33.77578	37.56317	33.16401	37.71246
PROB F STAT	0	0	0	0
Mean dependent var	-0.557454	-0.557454	-0.557454	-0.557454
S.D. dependent var	0.246442	0.246442	0.246442	0.246442
Akaike info criterion	-2.074763	-2.174207	-2.05773	-2.177932
Schwarz criterion	-1.223026	-1.32247	-1.205993	-1.326195
Hannan-Quinn criter.	-1.728656	-1.8281	-1.711623	-1.831825
DURBIN WATSON	1.293829	1.323896	1.412974	1.573927

Sumber: Eviews, 2018

Ket:

*Signifikan pada level 10%

** signifikan pada level 5%

*** signifikan pada level 1%

Berdasarkan penelitian Sarma dan Pais (2011), sebelum dilakukan pengujian regresi, terlebih dahulu nilai indeks inklusi keuangan harus di transformasi. Hal ini dikarenakan pada mulanya nilai indeks hanya berkisar pada range 0 dan 1, dengan dilakukan transformasi akan membuat nilai indeks berada diantara $-x$ dan x . hal ini diperbolehkan dalam regresi OLS.

Selain itu nilai variabel GDP per kapita juga dilakukan transformasi logaritma seperti dalam penelitian Park dan Mercado (2015), Allen et al., (2016), D-W. Kim et al., dll. Dimana tujuan transformasi adalah untuk menyederhanakan data gdp per kapita. Transformasi logaritma digunakan untuk melihat elastisitas variabel yang bernilai besar agar nilainya menjadi tidak terlalu jauh berbeda dengan nilai variabel lainnya. Menurut Gujarati (2012), jika regresor berbentuk logaritma, koefisiennya mengukur tingkat perubahan absolut pada regresan untuk persentase perubahan pada regresor.

Tranformasi pada data BRCH dan ATM juga dilakukan dalam penelitian ini. Ditransformasi terkait karakteristik data yang cenderung terdistribusi tidak normal .

Selanjutnya, alasan terkait pemisahan model menjadi empat persamaan, dikarenakan; pertama terdapat multikolinearitas yang tinggi antar variabel BRCH, ATM, INTRNT dan PHONE yang menggambarkan variabel keterjangkauan layanan keuangan, oleh karenanya untuk mendapatkan hasil estimasi yang efisien maka variabel-variabel yang diindikasikan saling berkorelasi dipisahkan. Kedua, jika menggabungkan semua variabel independen dalam satu persamaan maka estimasi menjadi bias dan tidak efisien, lantaran sebanyak 9 variabel dalam satu persamaan bias menimbulkan omitted variabel dan membuat tingkat signifikansi rendah.

4.2 PENGUJIAN HIPOTESIS

4.2.1 Hasil Uji Hipotesis F-Test

Dari hasil output regresi data panel dengan model fix efek pada table 4.6, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas F-test untuk semua persamaan sebesar 0,000. Dimana nilai tersebut lebih kecil dari alfa 0,05. Berdasarkan hipotesis dan dasar pengambilan keputusan, maka dalam hal ini memberikan kesimpulan bahwa hasil uji F tes menolak H_0 dan menerima H_a . Yang artinya secara bersama-sama semua variable independen dalam masing-masing persamaan, dalam hal ini tingkat pendapatan masyarakat, jenjang pendidikan SMP dan SMA yang telah ditamatkan, jumlah populasi, tingkat ketimpangan pendapatan, jumlah kantor cabang bank (1), jumlah outlet ATM (2), jumlah pengguna internet (3) dan perkembangan jumlah pengguna telpon seluler (4) memiliki pengaruh secara simultan terhadap variasi nilai variable dependen yang mana dalam penelitian ini adalah variabel inklusi keuangan.

4.2.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi (adj. R sq)

Nilai adjusted R sq. dari semua hasil output persamaan regresi data panel diatas rata-rata diatas 90%. Nilai adjusted R sq masing-masing persamaan diatas yakni 0.90483, 0.913838, 0.903195, 0.914159 Yang artinya masing-masing persamaan secara berurutan bahwa sekitar 90,48%, total variasi dari nilai inklusi keuangan dapat dijelaskan oleh variable tingkat pendapatan, jenjang pendidikan tingkat SMP dan SMA yang ditamatkan, jumlah populasi, tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat dan kantor cabang bank, Sisanya sebesar kurang lebih 9,52% dijelaskan oleh variable error.

Selanjutnya pada persamaan (2) Nilai adjusted R sq sebesar 0.9138. yang berarti bahwa sekitar 91,38%, total variasi dari nilai inklusi keuangan dapat dijelaskan oleh variable tingkat pendapatan, jenjang pendidikan tingkat SMP dan SMA yang ditamatkan, jumlah populasi, tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat dan outlet ATM, Sisanya sebesar kurang lebih 8,62% dijelaskan oleh variable error.

Pada persamaan (3), nilai adjusted R sq sebesar 0.9031. yang berarti bahwa sekitar 90,31%, total variasi dari nilai inklusi keuangan dapat dijelaskan oleh variable tingkat pendapatan, jenjang pendidikan tingkat SMP dan SMA yang ditamatkan, jumlah populasi, tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat dan pengguna internet. Sisanya sebesar kurang lebih 9,69% dijelaskan oleh variable error.

Nilai adjusted R sq untuk persamaan (4) yakni sebesar 0.9247. Artinya sekitar 92,47% variasi dari nilai inklusi keuangan dapat dijelaskan oleh variable tingkat pendapatan, jenjang pendidikan tingkat SMP dan SMA yang ditamatkan, jumlah populasi, tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat dan pengguna telpon seluler. Sisanya sebesar kurang lebih 7,53% dijelaskan oleh variable error.

4.2.3 Hasil Uji t (Pengujian Secara Parsial)

Hasil uji t akan menjelaskan terkait seberapa besar pengaruh masing-masing variable independen dapat mempengaruhi nilai varaibel dependennya. Dari hasil output regresi panel data dengan model fix efek pada table 6.4, maka hasil pengambilan keputusan t-test sbb;

- Variable pendapatan perkapita. Untuk masing-masing persamaan nilai probabilitas t statistik variabel pendapatan perkapita sebesar 0.000, 0.0001, 0.00017 dan pada persamaan terakhir 0.0296. Dengan nilai alfa 5% maka variable GDP memiliki pengaruh signifikan di semua persamaan terhadap variasi nilai inklusi keuangan di Indonesia. Karena nilai koefisien GDP positif maka semakin tinggi nilai GDP semakin tinggi pula nilai Inklusi Keuangan di Indonesia.
- Tingkat pendidikan SMP. Nilai probabilitas t- statistik dari variable EDU_{SMP} pada masing-masing persamaan sebesar 0.3561, 0.319, 0.2772, dan pada persamaan ke-4 nilai p-valuenya sebesar 0.1223. . Dimana nilai probabilitas tersebut lebih besar dari alfa 5%. Artinya variable EDU_{SMP} tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat inklusi keuangan di Indonesia.
- Berbeda dengan hasil uji parsial Tingkat pendidikan jenjang SMA/ sederajat ke atas Nilai probabilitas t- statistik dari variable EDU_{SMA} pada masing-masing persamaan sebesar 0.0487, 0.0162, 0.0186, dan pada persamaan ke-4 nilai p-valuenya sebesar 0.000. . Dimana nilai probabilitas tersebut kurang dari alfa 5%. Artinya variable EDU_{SMA} berpengaruh signifikan terhadap tingkat inklusi keuangan di Indonesia.
- Variable perkembangan jumlah Populasi. Nilai probabilitas t- statistik dari variable POP di masing-masing persamaan sebesar 0.1037, 0.5719, 0.7628, dan persamaan terakhir nilai p-valuenya sebesar 0.4554. Dimana nilai probabilitas tersebut lebih besar dari alfa 5%. Artinya variable POP tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat inklusi keuangan di Indonesia.

- Sama halnya dengan variabel populasi, Variable ketimpangan pendapatan pun dalam semua persamaan tidak signifikan memepengaruhi inklusi keuangan secara parsial. Nilai probabilitas t-statsitik dari variable INEQUALITY di masing-masing persamaan secara berurutan sebesar 0.2218, 0.2557, 0.5919, dan 0.899. Dimana nilai probabilitas tersebut lebih besar dari alfa 5%. Artinya variable INEQUALITY tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat inklusi keuangan di indonesia
- Variable Kantor Cabang Bank. Nilai probabilitas t statistik variable kantor cabang bank sebesar 0,0428 lebih kecil dari nilai alfa 5% maka variable BRCH memiliki pengaruh signifikan terhadap variasi nilai inklusi keuangan di Indonesia. Karena nilai koefisien BRCH positif maka semakin banyak kantor cabang bank semakin tinggi pula nilai Inklusi Keuangan di indoensia.
- Variable outlet ATM. Nilai probabilitas t-statistik variable ATM sebesar 0,0004 lebih kecil dari nilai alfa 5% maka variable ATM memiliki pengaruh signifikan terhadap variasi nilai inklusi keuangan di Indonesia. Karena nilai koefisien ATM positif maka semakin banyak jumlah ATM semakin tinggi pula nilai Inklusi Keuangan di indoensia.
- Variable Pengguna Internet. Nilai probabilitas t-statsitik dari variable IINTRNT sebesar 0.0948. Dimana nilai probabilitas tersebut kurang dari alfa 10%. Artinya variable INTRNT berpengaruh signifikan terhadap tingkat inklusi keuangan di Indoensia. Dengan nilai koefisien yang positif berarti bahwa arah pengaruh yang berikan variabel INTRT terhadap tingkat inklusi kuangan adalah positif. Dimana semakin tinggi penggunaan internet semakin tinggi pula tingkat inklusi keuangan dapat dicapai.

- Variable Penggunaan Telpn Seluler. Nilai probabilitas t-statistik variable phone sebesar 0.0001 lebih kecil dari nilai alfa 5% maka variable Penggunaan Telpn Seluler memiliki pengaruh signifikan terhadap variasi nilai inklusi keuangan di Indonesia. Nilai koefisien penggunaan telpn seluler positif maka semakin tinggi penggunaan telpn seluler semakin tinggi pula nilai inklusi keuangan di Indonesia.

4.3 PEMBAHASAN

➤ Variabel GDP per Kpita

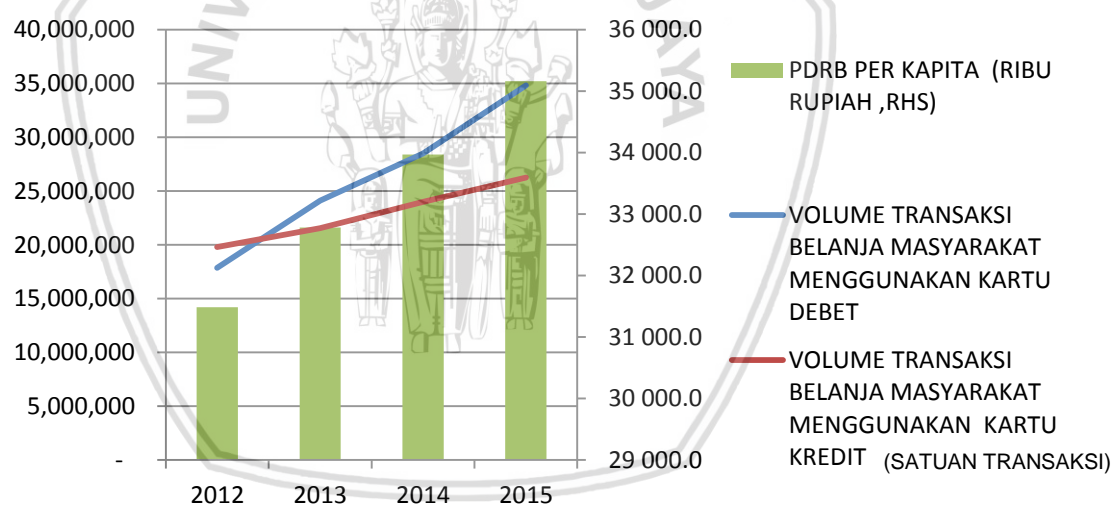
Dari hasil output regresi panel data pada table 4.6 memberikan hasil bahwa tingkat pendapatan perkapita masyarakat sangat mempengaruhi peningkatan inklusi keuangan secara parsial di seluruh provinsi Indonesia. Hal ini dilihat dari hasil output regresi data panel. Dimana dalam semua persamaan, variabel GDP per kapita sangat signifikan mempengaruhi inklusi keuangan.

Indikasi semakin tingginya tingkat pendapatan perkapita masyarakat akan menurunkan profil risiko yang dapat menghambat masyarakat dalam mengakses layanan keuangan, sehingga peluang masyarakat yang berpendapatan tinggi untuk mengakses layanan keuangan semakin besar. Selain itu dengan semakin tingginya pendapatan perkapita masyarakat, kesempatan untuk menabung dan menumbuhkan investasi melalui lembaga keuangan formal juga semakin besar. Hal ini tentunya jika berlanjut dalam jangka panjang akan meningkatkan roda perekonomian negara Indonesia.

Didukung dengan gambar 4.1 yang memperlihatkan tren penggunaan jasa keuangan dalam memenuhi transaksi belanja masyarakat

menggunakan produk-produk pelayanan dasar perbankan seperti transaksi belanja menggunakan kartu ATM dan kartu Kredit, dimana volume transaksi belanja masyarakat melalui produk keuangan yang ditawarkan perbankan semakin meningkat selama periode 2012 hingga 2015. Disisi lain pendapatan perkapita masyarakat secara nasional juga mengalami tren yang meningkat. Ini membuktikan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat akan mendorong peningkatan konsumsi masyarakat melalui metode pembayaran yang sudah disediakan perbankan.

Gambar 4.1: Pergerakan PDRB Per Kapita Indonesia dan Volume Belanja Masyarakat Menggunakan Kartu Debet Serta Kartu Kredit Tahun 2012-2015



Sumber : Bank Indonesia (data diolah), 2018

Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat akan mendorong peningkatan inklusi keuangan dari sisi demand yang artinya jika kemampuan masyarakat meningkat maka permintaan akan produk-produk keuangan juga akan meningkat seiring kebutuhan masyarakat tersebut, baik dalam hal bertransaksi, pembayaran, dll terkait jasa-jasa yang ditawarkan lembaga

keuangan formal khususnya perbankan umum konvensional di Indonesia. Hal ini juga didukung oleh hasil *Survey Financial Inclusion In Asia* yang dilakukan oleh Asian Development Bank (2014), yang dengan jelas mengatakan bahwa untuk mengakses layanan keuangan sangat tidak mungkin tanpa meningkatkan kapabilitas atau kemampuan dari individu dan perusahaan untuk mengakses ke-tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu meningkatkan inklusi keuangan sangat berkaitan dengan dampak langsung dari kemampuan individu dan seberapa luas *financial literate* individu.

Pada tahun 2010 berdasarkan World Bank Report, di Indonesia alasan utama masyarakat tidak dapat mengakses layanan keuangan dasar seperti tabungan adalah 79% masyarakat beralasan tidak memiliki cukup uang. Hal ini sangat mendukung adanya arah kebijakan yang berfokus meningkatkan kapabilitas individu seperti meningkatkan pendapatan masyarakat agar dapat menikmati layanan keuangan. Selain produk dasar seperti tabungan, dalam hasil survey world bank tersebut juga terlihat bahwa sebanyak 22% masyarakat yang ditolak dalam mengajukan kredit oleh perbankan dikarenakan penilaian risiko individu karena pendapatan yang rendah.

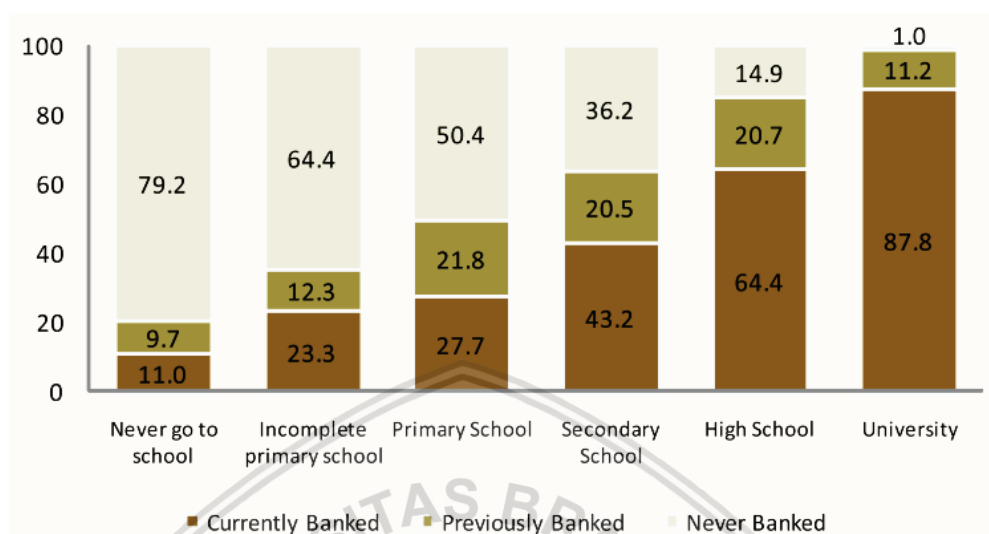
Hal ini didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa tingkat pendapatan masyarakat signifikan mempengaruhi inklusi keuangan negara-negara sedang berkembang di Asia (Park dan Mercado, 2015), tidak hanya di Asia, penelitian yang dilakukan Demirguc-kunt et al. (2011) juga membuktikan bahwa pendapatan per kapita dapat meningkatkan inklusi keuangan. Dimana semakin tinggi tingkat pendapatan perkapita masyarakat akan meningkatkan inklusi keuangan.

➤ Variabel Tingkat pendidikan (EDU_{SMP} dan EDU_{SMA})

Berbeda dengan hasil uji parsial Tingkat pendidikan jenjang SMA/ sederajat ke atas Nilai probabilitas t- statistik dari variable EDU_{SMA} pada masing-masing persamaan sebesar 0.0487, 0.0162, 0.0186, dan pada persamaan ke-4 nilai p-valuenya sebesar 0.000. . Dimana nilai probabilitas tersebut kurang dari alfa 5%. Artinya variable EDU_{SMA} berpengaruh signifikan terhadap tingkat inklusi keuangan di. Semakin besar persentase populasi dewasa yang menamatkan tingkat pendidikan SMA ketas , maka semakin besar pengaruhnya terhadap peningkatan inklusi keuangan. Artinya semakin banyak populasi dewasa yang terindikasi menamatkan jenjang pendidikan pada tingkat SMA keatas maka peluang pengetahuan masyarakat tentang layanan keuangan akan semakin besar dan pada akhirnya akan mendorong masyarakat yang *well educate* menggunakan jasa-jasa keuangan khususnya di sektor keuangan formal.

Sedangkan populasi dewasa yang hanya menamatkan jenjang pendidikan tingkat SMP tidak signifikan mempengaruhi inklusi keuangan. hal ini di dukung dengan survey *world bank*, 2010 di Indonesia terkait *improving access to financial services in Indonesia*. Dalam survey tersebut memperlihatkan komposisi kepemilikan akun keuangan di perbankan berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat, sbb:

Gambar 4.2: **Persentase Kepemilikan Akun Bank berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Indonesia Tahun 2010**



Sumber: World Bank, 2010

Dari gambar 4.2, terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh masyarakat kemungkinan menggunakan ataupun memiliki akun keuangan semakin besar. Dapat diamati bahwa kepemilikan akun bank tertinggi adalah golongan masyarakat dengan jenjang pendidikan SMA/ sederajat keatas yang mencapai lebih dari 50% populasi masyarakat dewasa.

Dari berbagai penelitian menunjukan bahwa tingkat pendidikan populasi dewasa memang sangat mempengaruhi inklusi keuangan seperti dalam penelitian zinsdan weil (2016), namun pada penelitian Allen et al., (2016) dan Fungacova (2014) hanya menemukan jenjang pendidikan *secondary school* signifikan mempengaruhi beberapa variabel penyusun inklusi keuangan seperti pembukaan akun rekening. Selain itu dalam penelitian Park dan Mercado (2015) menegaskan bahwa tingkat pendidikan dasar saja

yang berhasil ditamatkan oleh populasi dewasa tidak signifikan mempengaruhi inklusi keuangan negara berkembang di Asia.

➤ Variabel Tingkat Ketimpangan Pendapatan Masyarakat

Sedangkan Variable ketimpangan pendapatan dalam semua persamaan tidak signifikan memepengaruhi inklusi keuangan secara parsial. Artinya variable INEQUALITY tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat inklusi keuangan di Indonesia

Sebagian besar penelitian terdahulu juga tidak menemukan pengaruh signifikan ketimpangan dengan peningkatan inklusi keuangan seperti penelitian yang dilakukan oleh Babajide et al., tahun 2015. Didukung dengan penelitian Park dan Mercado dengan tahun penelitian yang sama, menemukan bahwa masih belum jelasnya pengaruh antara inklusi keuangan dengan tingkat ketimpangan pendapatan khususnya di Negara -Negara Asia yang sedang berkembang.

Namun beberapa penelitian seperti Beck et al.,(2007) mengatakan bahwa adanya *financial imperfections* seperti informasi dan biaya transaksi keuangan menghalangi masyarakat miskin yang tidak memiliki cukup syarat untuk mengakses layanan keuangan, sehingga layanan keuangan hanya bisa dinikmati oleh beberapa kalangan “kaya” saja dan mengakibatkan konsentrasi layanan keuangan dan tidakefisiennya alokasi dana-dana keuangan. Masalah-masalah seperti ini masih sangat banyak dijumpai di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karenanya dengan tingkat ketimpangan yang tinggi dimungkinkan akan mengurangi proses inklusi keuangan provinsi di seluruh Indonesia. Namun dalam penelitian ini tingkat ketimpangan tidak signifikan mempengaruhi inklusi keuangan. Masih

berdasarkan Beck et al., dimana beberapa peneliti terdahulu telah memprediksi bahwa kemungkinan hubungan ketimpangan dengan pembangunan layanan keuangan bersifat non-linear dan bergantung juga pada sejauh mana tingkat pembangunan ekonomi suatu negara.

➤ Variabel Jumlah Populasi Dewasa

Sama halnya dengan variabel ketimpangan pendapatan Variable perkembangan jumlah Populasi. Nilai probabilitas t- statistik dari variable POP di masing-masing persamaan sebesar 0.1037, 0.5719, 0.7628, dan persamaan terakhir nilai p-valuenya sebesar 0.4554. Dimana nilai probabilitas tersebut lebih besar dari alfa 5%. Artinya variable POP tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat inklusi keuangan di Indonesia.

Hal ini dikarenakan masih banyak jumlah populasi yang hidup di daerah pedesaan yang jauh dari jangkauan layanan keuangan, sehingga masih belum bisa dijangkau untuk menjadi target pemasaran produk-produk layanan keuangan. Data BPS menunjukkan persentase penduduk di Indonesia sebagian besar berada di daerah pedesaan. Pada tahun 2010, 50.21% penduduk Indonesia berada di daerah pedesaan, sehingga kecil kemungkinan ditargetkan sebagai pangsa pasar produk keuangan.

➤ Variabel Kantor Cabang Bank

Nilai probabilitas t statistik variable kantor cabang bank sebesar 0,0428 lebih kecil dari nilai alfa 5% maka variable BRCH memiliki pengaruh signifikan terhadap variasi nilai inklusi keuangan di Indonesia. Karena nilai koefisien

BRCH positif maka semakin banyak kantor cabang bank semakin tinggi pula nilai Inklusi Keuangan di Indonesia.

Peningkatan jaringan kantor cabang bank khususnya bank umum konvensional, menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong tingkat layanan keuangan kearah yang lebih inklusif dari sisi supply atau penawaran layanan jasa keuangan. Semakin luas jangkauan layanan sistem keuangan, maka semakin besar peluang untuk menarik masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan formal. Hal ini terjadi di Indonesia dimana jumlah kantor cabang bank yang meningkat, signifikan mempengaruhi tingkat inklusi keuangan. Penelitian sebelumnya juga memberikan kesimpulan serupa, yakni Cakravarty dan Pal (2013) yang menyarankan penetrasi geografi perbankan dengan perluasan kantor bank dan ATM sebagai dua kebijakan yang bisa ditargetkan untuk mempercepat peningkatan inklusi keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian Allen et al.,(2016) dalam permodelannya mengestimasi bahwa peningkatan cabang Bank dan penetrasi ATM dapat meningkatkan inklusi keuangan. hal ini di dukung oleh survey inklusi keuangan di Indonesia dimana salah satu hambatan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan adalah masalah jarak tempuh yang cukup jauh untuk menggunakan fasilitas keuangan.

Dengan semakin mudahnya keterjangkauan layanan keuangan akan mendorong masyarakat mengakses layanan keuangan terkait adanya kepuasan pelayanan yang dirasakan masyarakat.

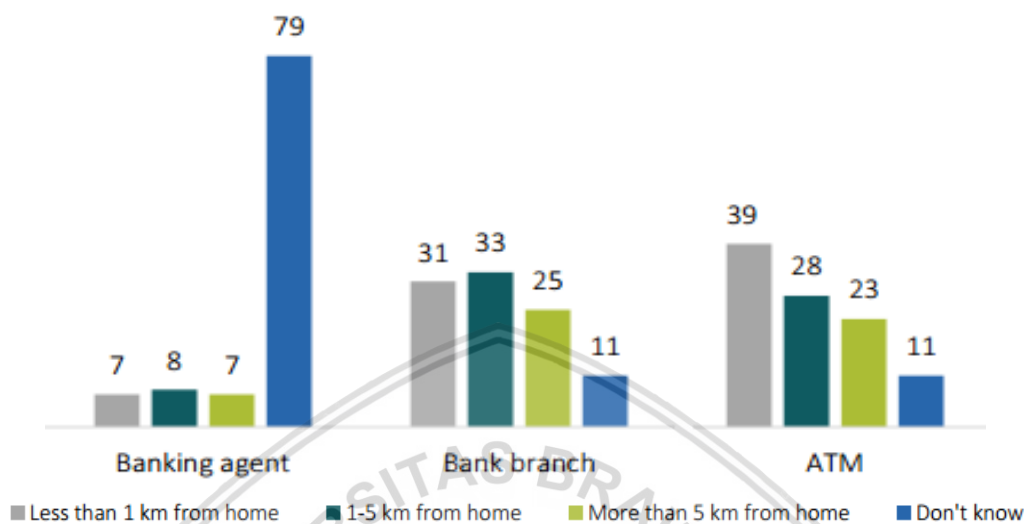
➤ Variabel ATM

Dari sisi penawaran jasa keuangan tidak hanya kantor cabang bank saja yang sangat signifikan mempengaruhi peningkatan inklusi keuangan, akan tetapi Variable outlet ATM dimana Nilai probabilitas t-statistik variable ATM sebesar 0,0004 lebih kecil dari nilai alfa 5% maka variable ATM memiliki pengaruh signifikan terhadap variasi nilai inklusi keuangan di Indonesia. Karena nilai koefisien ATM positif maka semakin banyak jumlah ATM semakin tinggi pula nilai Inklusi Keuangan di Indonesia.

Peningkatan jaringan ATM juga turut mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Hal ini dikarenakan dengan adanya peningkatan ketersediaan ATM akan memungkinkan kemudahan masyarakat dalam menjangkau layanan keuangan tanpa harus mendatangi kantor cabang bank. Melalui ATM saja masyarakat sudah dapat menggunakan layanan keuangan, hal ini sangat berkaitan dengan tingkat kepuasan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan yang semakin memudahkan masyarakat.

Namun berdasarkan hasil survey financial insight tahun 2016, bahwa masih banyaknya masyarakat yang terhambat akses keuangan lantaran ketidak terjangkaunya fisik infrastruktur keuangan seperti ATM dan Kantor cabang Bank. Berikut gambar terkait proksi hambatan masyarakat mengakses layanan keuangan :

Gambar 4.3: **Proksi Keterjangkauan Akses Poin Layanan Lembaga Keuangan Tahun 2016 (persen)**



Sumber : Intermedia, 2016

Terlihat dari gambar 4.3 berdasarkan hasil survey *financial inclusion insights* (2016) di Indonesia, alasan kebanyakan orang tidak menggunakan layanan keuangan lantaran ketidakterjangkauannya fisik bank. Sebanyak 79% masyarakat masih tidak mengetahui letak distribusi kantor agen-agen bank. Lebih jauh lagi sebanyak 25% masyarakat mengakui jarak kantor bank terdekat 5 Km dari rumah mereka. Bahkan 23% mengatakan lokasi ATM setidaknya berjarak 5 Km juga dari tempat tinggal mereka.

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya perluasan akses penetrasi geografi perbankan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses layanan keuangan.

➤ Variabel Telpon Seluler

Secara statistik Variable Penggunaan Telpon Seluler. Nilai probabilitas t-statistik variable phone sebesar 0.0001 lebih kecil dari nilai alfa 5% maka

variable Penggunaan Telpon Seluler memiliki pengaruh signifikan terhadap rata-rata nilai inklusi keuangan di Indonesia. Nilai koefisien penggunaan telpon seluler positif maka semakin tinggi penggunaan telpon seluler semakin tinggi pula nilai inklusi keuangan di Indonesia. Selain penetrasi kantor cabang bank dan ATM, akses keuangan melalui telpon seluler yang bisa digunakan bahkan dari jenis telpon seluler *non-andriod* juga sangat penting untuk ditindaklanjuti sebagai *channel* lain dari perluasan akses keuangan.

Dengan adanya penggunaan telepon seluler, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh penyedia jasa layanan keuangan, sebagai pengembangan produk-produk keuangan yang lebih memudahkan masyarakat dalam menjangkau layanan keuangan khususnya layanan di sektor keuangan formal. Penggunaan telpon genggam dalam praktek penawaran jasa keuangan sudah diaplikasikan pada beberapa produk seperti *mobile banking*, yang diharapkan dapat mendorong perluasan layanan keuangan yang lebih luas lagi.

Beberapa penelitian terdahulu mendukung adanya hal ini dalam suatu kebijakan peningkatan inklusi keuangan seperti, dalam penelitian Hannig And Jansen (2010), mengatakan bahwa telpon genggam merupakan *channel* yang dapat membuka peluang untuk layanan keuangan paling dasar bagi masyarakat miskin. Pemanfaatan teknologi secara drastis dapat menurunkan biaya produksi dalam transaksi keuangan *real-time*, meningkatkan *access point*, mengurangi penggunaan uang *cash* dan pada akhirnya akan menarik masyarakat yang sebelumnya tergolong *unbanked*. Di beberapa negara telah terbukti penggunaan telpon genggam dapat meningkatkan inklusi keuangan seperti di Philipphine yang telah

meluncurkan layanan *mobile payment*, mengestimasi telah memiliki 5,5 juta pengguna.

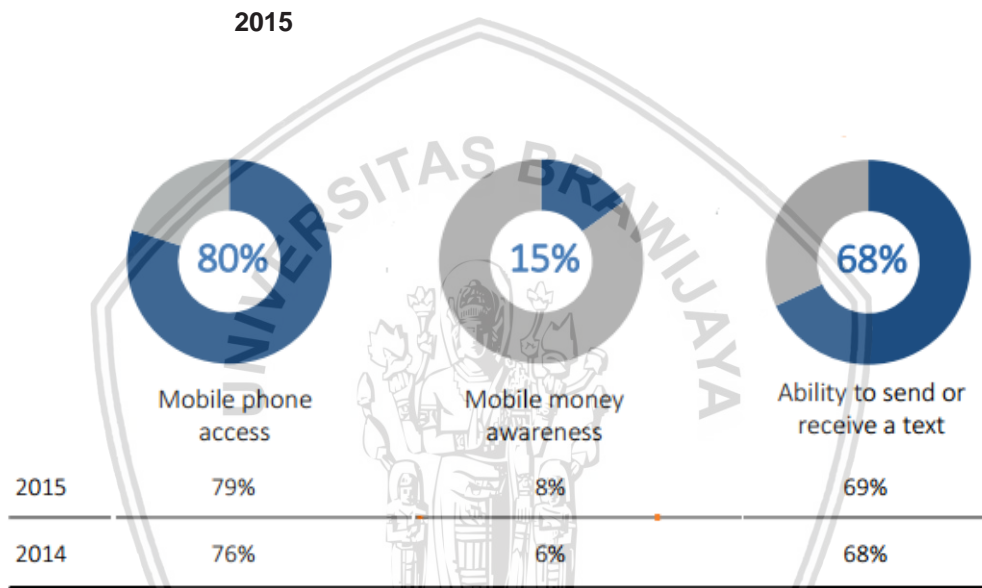
➤ Variabel Akses Internet

Berbeda dengan akses internet yang juga signifikan mempengaruhi inklusi keuangan di Indonesia, namun dengan tingkat signifikansi yang rendah dan nilai koefisien paling rendah diantara variabel lainnya, yang secara statistik, nilai probabilitas t-statistik dari variabel INTRNT sebesar 0.0948. Dimana nilai probabilitas tersebut kurang dari alfa 10%. Artinya variabel INTRNT berpengaruh signifikan terhadap tingkat inklusi keuangan di Indonesia. Dengan nilai koefisien yang positif, berarti bahwa arah pengaruh yang diberikan variabel INTRNT terhadap tingkat inklusi keuangan adalah positif. Dimana semakin tinggi penggunaan internet semakin tinggi pula tingkat inklusi keuangan dapat dicapai.

Namun bukti bahwa pengembangan teknologi dalam sektor keuangan di Indonesia belum sepenuhnya berhasil diterapkan akan tetapi diyakini dalam jangka panjang akan memberikan pengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan di Indonesia. Pasalnya dalam beberapa kasus, penawaran layanan keuangan melalui internet masih tinggi akan risiko dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penggunaan produk keuangan berbasis internet. Rendahnya tingkat melek internet masyarakat juga mendukung kurang aplikatifnya penggunaan internet sebagai jalur peningkatan inklusi keuangan saat ini di Indonesia. Hal ini didukung oleh hasil survey *finansial inclusion insights* pada tahun 2016 hanya sebesar 5% saja pengguna telepon genggam di Indonesia yang mengakses internet untuk keperluan transaksi keuangan.

Berikut akan disajikan gambaran persentase populasi dewasa pengguna telpon genggam, persentase populasi dewasa yang bisa mengirim dan menerima pesan dari telpon genggam dan persentase populasi dewasa yang peduli akan penggunaan telpon genggam sebagai salah satu akses keuangan (*mobile money*) di Indonesia pada tahun 2014 dan 2015.

Gambar 4.4: Persentase indikator Populasi Dewasa yang menggunakan layanan keuangan berbasis digital di Indonesia tahun 2014-2015



Sumber : financial inclusion.org, 2017

Berdasarkan gambar 4.4 terlihat bahwa penggunaan layanan keuangan berbasis digital terus meningkat walaupun dalam porsi persentase yang masih kecil. Namun dalam survey financial insight memperlihatkan tren peningkatan penggunaan layanan keuangan digital berbasis telpon genggam sebagai salah satu channel untuk mempercepat proses inklusi keuangan di Indonesia. Dikarenakan akses terhadap telpon genggam sudah sangat menjamur di Indonesia, namun tidak diiringi dengan edukasi terkait pemanfaatan teknologi untuk keperluan layanan keuangan menjadi hambatan mengapa banyak pengguna telpon genggam yang masih minim

mengkases layanan keuangan. dengan potensi masyarakat yang sudah ada, seperti kebanyakan masyarakat sudah bisa mengerti dasar-dasar penggunaan telpon seluler akan memudahkan aplikasi atau edukasi terkait layanan keuangan seperti *mobile banking* ataupun internet banking. Produk keuangan seperti *SMS-banking* yang memberikan pelayanan keuangan dasar juga bisa di gunakan oleh masyarakat dengan jenis telpon seluler *non-android* akan memberi banyak kemudahan dalam prakteknya.

4.4 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil analisis yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dimungkinkan bahwa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan inklusi keuangan di wilayah Indonesia adalah dengan mendorong kemapanan individu masyarakat baik dari sisi peningkatan pendapatan masyarakat dapat dilakukan dengan memperluas kesempatan kerja, sehingga masyarakat memiliki tingkat pendapatan yang cukup untuk mengakses layanan keuangan dan dapat meminimalisir profil risiko yang menghambat masyarakat mengakses layanan keuangan.

Selain itu, diharapkan pada masa yang akan datang dengan mengamati pola perilaku kegiatan perekonomian masyarakat terkhususnya dalam melibatkan jasa-jasa yang disediakan sektor keuangan mampu memberikan produk-produk keuangan sesuai kebutuhan masyarakat dengan biaya yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Sehingga dengan pendapatan masyarakat yang terbatas, masyarakat tetap dapat menggunakan jasa-jasa keuangan yang diharapkan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Begitupun dengan kualitas masyarakat yang harusnya melek akan kegiatan-kegiatan disektor keuangan khususnya industry perbankan. Dengan semakin

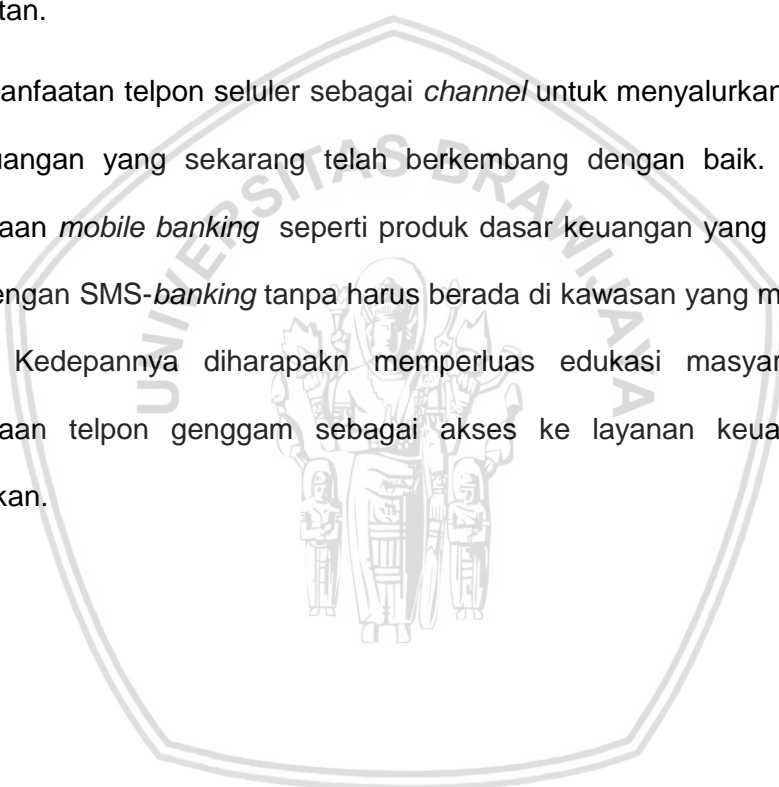
banyaknya masyarakat yang berhasil menamatkan jenjang pendidikan SMA sederajat keatas, maka semakin besar pula peluang masyarakat tersebut untuk menggunakan produk-produk keuangan. Selain itu, dengan mengedukasikan masyarakat terkait kegiatan sektor keuangan merupakan hal yang harus dipertimbangkan sebagai langkah-langkah awal dalam mendorong inklusi keuangan. misalnya dengan mengadakan workshop atau memberikan edukasi dini kepada masyarakat agar terbiasa dengan penggunaan jasa-jasa keuangan khususnya di lembaga-lembaga formal.

Implikasi lain yang dapat ditemukan dari hasil penelitian ini adalah bahwa perluasan jangkauan infrastruktur yang dapat mendorong pelayanan jasa keuangan adalah dengan memperluas jangkauan BRCH, ATM, PHONE, dan Internet. Dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini semua perhitungan banyaknya ATM yang beredar diberbagai wilayah dihitung dalam satu kesatuan yaitu dengan menganggap semua ATM perbankan yang tersebar dapat digunakan masyarakat sebagai jenis ATM kepemilikan Bank Umum Konvensional. Hal ini memberikan sebuah gambaran bahwa jika suatu saat ATM yang sudah tersebar di seluruh wilayah dapat digunakan oleh semua orang yang memiliki *ATM card* dari bank-bank umum konvensional tanpa adanya segmentasi ATM berdasarkan kepemilikan masing-masing bank. Atau dengan artian bahwa makin banyaknya persebaran ATM bersama yang dapat digunakan oleh *ATM card* dari berbagai jenis bank secara bersama-sama, maka hal ini akan sangat baik dampaknya terhadap perluasan inklusi keuangan.

Selanjutnya terkait perkembangan teknologi yang dapat memberikan layanan keuangan dengan mejangkau masyarakat tanpa harus membangun fisik infrastruktur perbankan yaitu dengan mengembangkan telpon seluler dan pemanfaatan akses internet. Berdasarkan penelitian ini, diharapkan edukasi

masyarakat terkait penggunaan telpon seluler dan pemanfaatan akses internet untuk mengakses layanan keuangan sangat penting untuk diagendakan. Mengingat hambatan inklusi keuangan di Indonesia sebagai negara dengan wilayah geografi yang cukup luas, maka pengembangan layanan keuangan berbasis teknologi akan sangat membantu masyarakat, industri perbankan, maupun *stake holder* terkait dalam mendorong peningkatan inklusi keuangan dengan harapan dapat mengentaskan masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Pemanfaatan telpon seluler sebagai *channel* untuk menyalurkan produk dan jasa keuangan yang sekarang telah berkembang dengan baik. Diantaranya penggunaan *mobile banking* seperti produk dasar keuangan yang bisa diakses hanya dengan SMS-*banking* tanpa harus berada di kawasan yang memiliki akses internet. Kedepannya diharapkan memperluas edukasi masyarakat terkait penggunaan telpon genggam sebagai akses ke layanan keuangan harus ditingkatkan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Secara umum dapat diuraikan bahwa tingkat inklusi keuangan di Indonesia sejak tahun 2012 hingga 2015 mengalami *trend* yang terus meningkat. Secara rata-rata sebagian besar provinsi di Indonesia tergolong dalam kategori *medium index of financial inclusion* dan hanya 12 provinsi di Indonesia yang dikategorikan dalam kelompok *high index of financial inclusion*. Sebagian besar provinsi yang berada di Kawasan Timur Indonesia memiliki tingkat inklusi keuangan rata-rata yang masih rendah.

Lebih lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat inklusi keuangan di Indonesia antara lain peningkatan GDP per kapita, jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh populasi dewasa pada tingkat SMA/ sederajat ke atas, perluasan jangkauan kantor cabang bank umum dan ATM, serta pemanfaatan teknologi seperti penggunaan telepon genggam dan pemanfaatan internet sebagai *channel* baru untuk mendistribusikan produk jasa keuangan dapat mempercepat proses keinklusi layanan keuangan di Indonesia. Sedangkan variabel jenjang pendidikan SMP/ sederajat, ketimpangan pendapatan dan perkembangan jumlah populasi tidak memiliki pengaruh terhadap inklusi keuangan seluruh provinsi di Indonesia.

Variable pendapatan perkapita masyarakat sangat berpengaruh terhadap peningkatan inklusi keuangan di Indonesia dimungkinkan karena semakin tinggi

pendapatan masyarakat, semakin besar pula kemampuan masyarakat untuk menikmati layanan keuangan yang ditawarkan.

Begitu pula dengan tingkat pendidikan masyarakat, yang dimungkinkan menjadi penentu masyarakat dalam mempertimbangan penggunaan layanan keuangan dalam kegiatan ekonominya seiring dengan pengetahuan yang dimiliki. Tingkat pendidikan dimungkinkan mencerminkan pengetahuan masyarakat akan penggunaan, manfaat serta pengaruh layanan keuangan bagi kehidupan masyarakat. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan masyarakat, dimungkinkan dapat meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Oleh sebab itu, tingkat pendidikan jenjang SMP/ sederajat tidak mempengaruhi inklusi keuangan dimungkinkan karena terlalu rendahnya jenjang pendidikan SMP untuk mengerti tentang layanan keuangan dan tidak cukupnya literasi masyarakat terkait layanan keuangan hanya dengan menamatkan tingkat pendidikan SMP/ sederajat.

Selain itu variabel keterjangkauan akses sebagai supply layanan keuangan ke masyarakat didominasi oleh penyebaran ATM diikuti oleh persebaran kantor cabang bank dan disusul oleh penggunaan telpon genggam dan internet. Penetrasi infrastruktur perbankan dimungkinkan sangat mempengaruhi percepatan proses inklusi keuangan, lantaran dengan semakin mudahnya masyarakat menjangkau layanan keuangan akan memotivasi masyarakat untuk menggunakan jasa lembaga keuangan tersebut. Dominasi persebaran ATM dan kantor cabang bank masih menjadi hal yang sangat diperlukan oleh masyarakat dibandingkan pengembangan akses melalui internet dan telpon genggam yang masih dirasa kurang begitu menarik banyak masyarakat untuk bergabung menggunakan layanan keuangan.

Variabel ketimpangan pendapatan dimungkinkan tidak mempengaruhi inklusi keuangan karena diberbagai Negara berkembang seperti Indonesia, masalah ketimpangan pendapatan dan tingginya pertumbuhan populasi masih menjadi suatu hal yang mengawatirkan, lantaran akan menjadi tantangan tersendiri dalam mendukung terciptanya pemerataan layanan keuangan bagi masyarakat. Dan juga belum banyak penelitian yang menemukan pengaruh tingkat ketimpangan pendapatan dengan inklusi keuangan. Disisi lain dapat dilihat tingkat ketimpangan Indonesia yang terus naik antar waktu sedangkan inklusi keuangan juga terus meningkat. Hal ini menjadi tidak relevan terkait karakteristik Indonesia sebagai negara sedang berkembang. Dimana pada penelitian terdahulu mengatakan dampak tingkat ketimpangan pendapatan terhadap pembangunan keuangan bergantung juga pada level pembangunan ekonomi suatu negara.

Sedangkan variabel perkembangan jumlah populasi di Indonesia dimungkinkan tidak mempengaruhi inklusi keuangan karena berdasarkan data BPS, jumlah populasi yang hidup di daerah pedesaan lebih banyak dibandingkan dengan daerah perkotaan. Hal ini menyebabkan keterjangkauan layanan keuangan sangat sulit didapatkan oleh penduduk di pedesaan dan menjadi semakin eksklusif dari layanan keuangan.

5.2 SARAN

Dengan terlihatnya hasil pemetaan tingkat inklusi keuangan seluruh provinsi-provinsi di Indonesia, yang mana masih belum meratanya layanan jasa keuangan formal di berbagai daerah. Arah kebijakan sebaiknya ditargetkan dengan memberikan pertimbangan peluang dan kesempatan yang sama bagi seluruh wilayah. Seperti lebih memperhatikan wilayah timur Indonesia yang

paling banyak mengalami ketertinggalan baik dari sisi kemampuan permintaan layanan keuangan maupun dari sisi supply layanan keuangan yang masih sangat terbatas. Memantapkan kemampuan setiap individu merupakan hal yang utama dalam mendukung pelaksanaan keinklusan layanan keuangan. Terutama untuk daerah yang masih dalam kategori *middle financial inclusion* seperti Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku, Sumatra Barat, Kep. Banka Belitung, Bengkulu, Aceh, NTT, Maluku Utara, Jawa tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Riau, Jambi, Sulawesi Tengah, Gorontalo, NTB, Sulawesi Barat, Lampung.

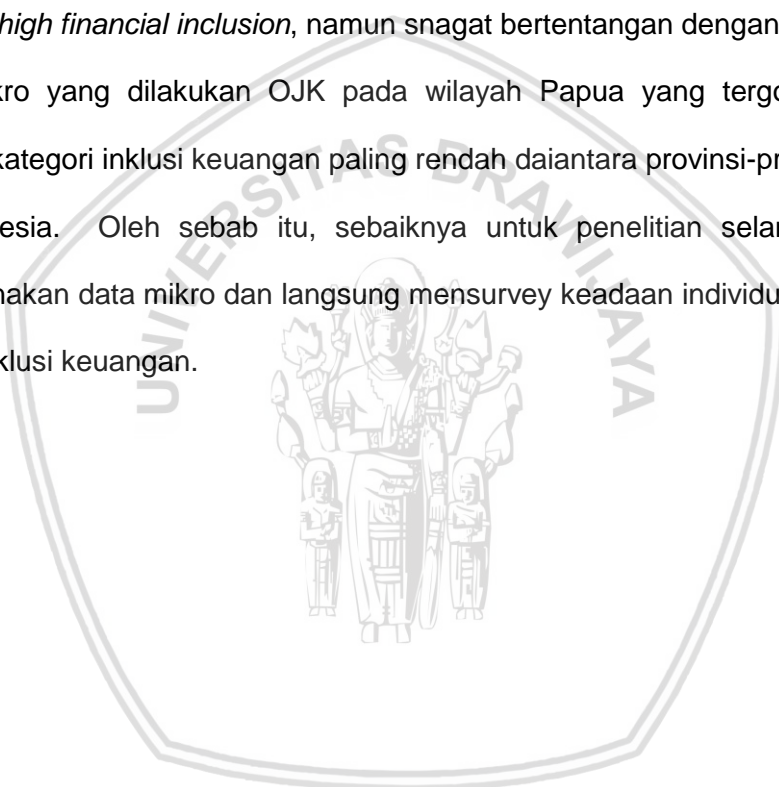
Dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan tingkat pendidikan terutama edukasi terkait layanan-layanan yang disediakan oleh sektor keuangan terkhususnya mengenal produk-produk keuangan di lembaga-lembaga formal seperti perbankan dan mendorong peningkatan pendapatan sehingga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan permintaan layanan keuangan.

Selain itu, terus meningkatkan penawaran layanan keuangan dengan meningkatkan infrastruktur keuangan khususnya penetrasi geografis perbankan akan sangat besar pengaruhnya terhadap peningkatan inklusi keuangan seluruh provinsi di Indonesia.

Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan, antara lain masih belum jelasnya teori yang bisa digunakan dalam penelitian sebagai acuan yang tepat untuk menjelaskan pengaruh antar variabel. Selain itu masih banyak pro dan kontra mengenai hasil estimasi variabel-variabel yang berpengaruh terhadap peningkatan inklusi keuangan, serta masih banyak variabel lainnya yang mungkin memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap peningkatan inklusi keuangan akan tetapi tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Selain itu, dalam penelitian ini juga belum dapat menjelaskan secara pasti seberapa besar pengaruh variabel-variabel dalam penelitian terhadap inklusi keuangan.

Disamping itu, Hasil perhitungan indeks inklusi keuangan dari data-data makro membuat pola nilai indeks inklusi keuangan antar provinsi di Indonesia masih jauh dari realita dilapangan. Seperti pada provinsi di wilayah Papua yang secara perhitungan data makro memiliki nilai indeks inklusi keuangan dengan kategori *high financial inclusion*, namun sangat bertentangan dengan hasil survey data mikro yang dilakukan OJK pada wilayah Papua yang tergolong dalam wilayah kategori inklusi keuangan paling rendah diantara provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Oleh sebab itu, sebaiknya untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan data mikro dan langsung mensurvey keadaan individu di lapangan terkait inklusi keuangan.



DAFTAR PUSTAKA

- ADBI-Institute. 2014. *Financial Inclusion In Asia :Country Surveys*. Asian Development Bank Institute www.Adbi.org diakses pada 23 november 2017
- Agénor, Pierre-Richard dan Canuto, Otaviano.2017.Access to finance, product innovation and middle-income traps.*Research in Economics*, Vol.71 :337–355. www.elsevier.com/locate/rie. diakses pada 23 november 2017
- Allen, Franklin, Demirgüç-Kunt, A., L., Klapper, Maria Soledad Martinez Peria. 2012. The foundations of financial inclusion. *World Bank Policy Res. Work.Pap.* Seri. 6290. diakses pada 18 oktober 2017
- Allen, Franklin, Demirgüç-Kunt, A., L., Klapper, Maria Soledad Martinez Peria. 2016. The Foundation of financial inclusion; Understanding ownership and use of formal account. *Journal Financial Intermediation*, Vol. 27 : 1-30. www.elsevier.com/locate/jfi diakses pada 18 oktober 2017
- Anzoategui, Diego, Demirgüç-Kunt, A., Mari 'A Soledad Marti 'Nez Peri 'A. 2013. Remittances And Financial Inclusion: Evidence From El Salvador. *World Development* Vol. 54, pp : 338–349. www.elsevier.com/locate/worlddev diakses pada 15 oktober 2017
- Amidžić, G. A. Massara, dan A. Mialou. 2014. Assessing countries' financial inclusion standing—a new composite index. *International Monetary Fund Working Paper* No. 14/36. Washington, DC. www.imf.org diakses pada 20 Mei 2017
- Arun, Thankom dan Kamath, Rajalaxmi. 2015. Financial inclusion : Policies and practice. *Indian Institute Of Management Bangalore*, Vol. 27 : 267-287. Www.Elsevier.Com/Locate/limb. diakses Pada 19 Oktober 2017
- Ascarya, Siti Rahmawati Dan Hendri Tanjung. 2015. Design and determine holistic financial inclusion through baitul maal wa tamwil. *Working Paper Bank Indonesia*. Banking Research And Education, Bank Indonesia, Jakarta. www.bi.go.id. diakses pada 20 mei 2017
- Babajide ,Abiola A., Folasade B. Adegboye, Dan Alexander E. Omankhanlen.. 2015. Financial inclusion and economic growth in Nigeria. *International Journal Of Economics And Financial Issues*, Vol. 5, (No.3). Www.Econjournals.Com. diakses pada 20 mei 2017

Bank Indonesia.2014.*Booklet Keuangan Inklusif*. Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan Umkm.www.bi.go.id diakses pada 15 agustus 2017

Bank Indonesia.2016.*Digital Financial Inclusion In Indonesia*. www.bi.go.id diakses pada 21 maret 2017

Beck,Thorsten And Asli Demirgüç-Kunt And Ross Levine.2007.Finance, inequality and the poor.*Journal of economic growth*, Vol.12 : 27-49. siteresources.worldbank.org diakses pada 18 november 2017

Beck,Thorsten And Asli Demirgüç-Kunt And Ross Levine.2004. Finance, inequality and The Poor:cross-country evidence. <http://econ.worldbank.org/programs/finance> diakses pada 18 mei 2017

Beck,Thorsten And Asli Demirgüç-Kunt And Ross Levine.2009.Financial institutions and markets across countries and over time data and analysis.*Policy Research Working Paper 4943*.[Http://Econ.Worldbank.Org](http://Econ.Worldbank.Org). diakses pada 18 mei 2017

Binswanger ,Hans P. 2006. Empowering rural people for their own development.August 12-18,*International Association Of Agricultural Economists Conference*,Gold Coast, Australia. <http://onlinelibrary.wiley.com> diakses pada 21 mei 2017

Binswanger ,Hans P.,Shahidurr.Khandker,And Mark R.Rosenzwei.1989. How infrastructure and financial institutions affect agricultural output and investment inIndia. *Agriculture Operations Division,Latin America And Caribbean Country Department*. Washington DC. documents.worldbank.org diakses pada 20 november 2017

Badan Pusat Statistik.2012.*Statistik Pemuda Indonesia*.Badan Pusat Statistik; Jakarta. [www.bps.go](http://www.bps.go.id) diakses pada 18 februari 2018

Badan Pusat Statistik.2013.*Statistik Pemuda Indonesia*.Badan Pusat Statistik; Jakarta. [www.bps.go](http://www.bps.go.id) diakses pada 18 februari 2018

Badan Pusat Statistik.2014.*Statistik Pemuda Indonesia*.Badan Pusat Statistik; Jakarta. [www.bps.go](http://www.bps.go.id) diakses pada 18 februari 2018

Badan Pusat Statistik.2015.*Statistik Pemuda Indonesia*.Badan Pusat Statistik; Jakarta. [www.bps.go](http://www.bps.go.id) diakses pada 18 februari 2018

- Calderon, C., & Liu, L. (2003). The Direction Of Causality Between Financial Development And Economic Growth. *Journal Of Development Economics*, Vol. 72, (no.1) : 321-334. <https://econpapers.repec.org> diakses pada 20 November 2017
- Chauvet, Lisa dan Jacolin, Luc. 2017. Financial inclusion, bank concentration, and firm performance. *World Development*, Vol. 97 :1-13. [Www.Elsevier.Com/Locate/Worlddev](http://www.Elsevier.Com/Locate/Worlddev) Diakses Pada 18 Oktober 2017.
- Chakravarty, Satya R., & Pal, Rupayan. 2013. Financial inclusion in India : An axiomatic approach. *Journal Of Policy Modeling*, Vol. 35: 813-837. [Www.Elsevier.Com/Locate/Jpm](http://www.Elsevier.Com/Locate/Jpm) Diakses Pada 18 Oktober 2017
- Crouzille, M.C., Nys, E., & Sauviat, A. 2012. Contribution of rural banks to regional economic development : Evidence from the Philippines. *Regional Studies* 46(6), 775- 791 unpan1.un.org/intradoc/groups/public diakses pada 20 November 2017
- Cull, Robert, Tilman Ehrbeck, And Nina Holle. 2014. Financial inclusion and development: recent impact evidence 92. www.cgap.org diakses pada 20 Oktober 2017.
- Demirguc-Kunt, A., Beck, T., & Honohan, P. (2008). *Finance for all? Policies and pitfalls in expanding access*. Washington, DC: The World Bank. <https://siteresources.worldbank.org> diakses pada 21 Juni 2017
- Demirgüç-Kunt, A., Córdova, Ernesto L., María Soledad Martínez Pería, Christopher Woodruff. 2011. Remittances and banking sector breadth and depth: Evidence from Mexico. *Journal of Development Economics*, vol. 95 : 229–241. www.elsevier.com/locate/devec . Diakses pada 15 oktober 2017
- Demirgüç, -Kunt, A., Klapper, L., 2012. Measuring financial inclusion. The global finindex data base. *Policy Research Working Paper*, No. 6025. The World Bank, Washington, DC. www.worldbank.org.id diakses pada 18 oktober 2017.
- Demirgüç, -Kunt, A., Klapper, L., 2013. Measuring financial inclusion: Explaining variation in use of financial services across and within countries. *Brookings Paper On Economic Activity* Vol. 44, Issue 1 (Spring) :279-340 https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/2013a_klapper.pdf diakses pada 18 oktober 2017

Demirgüç, A., Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Van Oudheusden, P., 2015. The Global Findex Database 2014. Measuring Financial Inclusion Around the World. *Policy Research Working Paper* No. 7255. The World Bank, Washington, DC. www.worldbank.org diakses pada 18 oktober 2017.

Demirgüç-Kunt, A., Córdova, Ernesto L., María Soledad Martínez Pería, Christopher Woodruff. 2011. Remittances and banking sector breadth and depth: Evidence from Mexico. *Journal Of Development Economics* Vol: 95 229–241. www.elsevier.com/locate/devec diakses pada 15 oktober 2017

Dienillah, A., Azifah Dan Lukytawati Anggraeni. 2016. Dampak Inklusi Keuangan Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Asia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, Vol. 18 (No. 4). www.bi.go.id diakses pada 20 Mei 2017

Dhrifi, A., 2013. Financial development and the growth inequality poverty triangle. *Int. J. Econ. Finance Manage.* 2 (7), 472–481. www.ejournalofbusiness.org/archive diakses pada 20 Mei 2017

Ekananda, Mahyus. 2016. *Analisis Ekonometrika Data Panel (Edisi kedua)*. Jakarta: Mitra wacana media.

Fungacova, Zuzana & Weill, Laurent. 2015. Understanding financial inclusion in China. *Journal China Economic Review*, Vol. 34 : 196-206. <http://dx.doi.org/10.1016/j.chieco.2014.12.004> Diakses Pada 19 Oktober 2017

Fuwa, Nobuhiko. 2007. Comments on: Beck, Demirgüç-kunt & Levine, "finance, inequality and the poor". *Japan Bank For International Cooperation (Jbic)* www.imf.org/External/NP/seminars/eng/2007/jbic/pdf/ diakses pada 21 oktober 2017

Gabriella, Grace L., dan Goeltum, Miranda S. 2013. *Pengaruh Pembangunan Keuangan Perbankan dan Akses Keuangan Perbankan Terhadap Kemiskinan di Indonesia*. <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-08/S44038-Laura%20Grace%20Gabriella> diakses pada 22 November 2017

Gwalani, Hema Dan Parkhi, Shilpa. 2014. Financial inclusion - building a success model in the Indian context. *Sosial and Behavioral Sciences*, Vol. 133 : 372 – 378) sciencedirect.com/science diakses pada 20 Oktober 2017

Gujarati, Damodar N. and Porte, Dawn C., 2010. *Basic Econometric*. 5th ed. Buku 1. (Eugenia Mardunugraha, Sita Wardhan dan Carlos Mangunsong). Jakarta: Salemba Empat.

Gujarati, Damodar N. and Porte, Dawn C., 2012. *Basic Econometric*. Buku 2 (edisi 5). (Eugenia Mardunugraha, Sita Wardhan dan Carlos Mangunsong). Jakarta: Salemba Empat.

Hannig, A., And S. Jansen. 2010. Financial inclusion and financial stability: current policy issues. *Adbi Working Paper* 259. Tokyo: Asian Development Bank
Institute:
[Http://Www.Adbi.Org/WorkingPaper/2010/12/21/4272.Financial.Inclusion.Stability.Policy.Issues/](http://www.adbi.org/WorkingPaper/2010/12/21/4272.Financial.Inclusion.Stability.Policy.Issues/) diakses pada 18 oktober 2017.

Honahan, P. 2007. Cross-country variation in household access to financial services. World Bank Paper Conference on "Access to Finance," Washington, DC. <https://econpapers.repec.org>. diakses pada 20 oktober 2017

Honahan, P. 2008. Cross-country variation in household access to financial services. *Journal of Banking and Finance* 32: pp. 2493–2500.
<https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2008.05.004> Diakses Pada 21 Maret 2017

Intermedia Indonesia. 2016. *Financial Inclusion Insight; Indonesian Wave 3 Report FII Tracker Survey*. www.finclusion.org diakses pada 11 july 2017

Iqbal, Badar Alam & Sami Shaista. 2017. Role of banks in financial inclusion in India. *Jurnal Contaduria Y Administration*, Vol. 62 :644-566.
<https://doi.org/10.1016/j.cya.2017.01.007> Diakses Pada 18 Oktober 2017.

Kim, D-W., Yu, Jung-Suk, M. Kabir Hassan. 2017. Financial inclusion and economic growth in OIC countries. *Research In International Business And Finance*.
[Www.Elsevier, Com/Locate/Ribaf](http://www.elsevier.com/locate/ribaf) Diakses Pada 15 Oktober 2017

Kostov, Philip, Arun , Thankom, dan Samuel Annim. 2015. Access to financial services: The case of the 'Mzansi' account in South Africa. *Review of Development Finance*, Vol. 5: 34-42. www.elsevier.com/locate/rdf diakses pada 19 oktober 2017

Leyshon, A., Thrift, N. 1995. Geographies of financial exclusion: financial abandonment in Britain and the united state. *Trans Inst. Br. Geogr*, Vol. 20 (No. 3) :312-341

Mylonidis, Nikolaos, Chletsos, Michael dan Vanessa Barbagianni. 2017. Financial exclusion in the USA: looking beyond demographics. *Journal of financial stability* <http://dx.doi.org/10.1016/j.jfs.2017.09.004> diakses pada 18 oktober 2017

Neaime, Simondan Gaysset, Isabelle. 2017. Financial inclusion and stability in MENA: Evidence from poverty and inequality. *Finance Research Letters*, vol. 30 : 1544-6123. www.elsevier.com/locate/frl diakses pada 19 oktober 2017.

Nachrowi, D. dan Usman, H.2006.*Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.

Oecd.2015. *Survei Ekonomi Oecd Indonesia*. Oecd Publishing. www.oecd.go.id diakses pada 18 oktober 2017

Otoritas Jasa Keuangan.2015.*Potensi Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau Dari Penyaluran Kredit Perbankan Kepada Sektor Prioritas*.www.ojk.go.id diakses pada 15 maret 2017.

Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Statistik Perbankan Indonesia*.www.ojk.go.id diakses pada 21 november 2017

Otoritas jasa keuangan.2018. *Data Indikator Inklusi Keuangan Per DATI I*.

Otoritas jasa keuangan. *Data Perkembangan Indeks Inklusi Keuangan Di Indonesia Tahun 2016*. <http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers> diakses pada 11 november 2017.

Park ,Cyn-Young And Rogelio V. Mercado, Jr. 2015.Financial inclusion, poverty, and income inequality in developing asia. *Adb Economics Working Paper Series 426*.www.adb.org. diakses pada 18 oktober 2017.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/Pojk.07/2016.Tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Untuk Konsumen Dan/Atau Masyarakat.Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. <http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perindungan-konsumen/regulasi/peraturan-ojk> diakses pada 21 desember 2017

Sanjaya, I Made dan Nursechafia.2016. Inklusi Keuangan Dan Pertumbuhan Inklusif:Analisis Antar Provinsi Di Indonesia.*Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*,Vol. 18(No.3). www.bi.go.id diakses pada 18 september 2017.

Sarma, M. 2008. Index of Financial Inclusion.*Indian Council for Research on International Economic Relations Working Paper No. 215*. icrier.org/pdf/Mandira%20Sarma-Paper diakses pada 9 Oktober 2017

Sarma, Mandira and Pais, Jesim. 2011. Financial inclusion and development : a cross country analysis. *Journal of international development*,Vol. 23 :613-628 www.researchgate.net/ diakses pada 9 Oktober 2017

Sarma, M.2012. Index of financial inclusion – A measure of financial sector inclusiveness. *Berlin Working papers on money, finance, trade and development. Working paper* No.07/2012. finance-and-trade.htw-berlin.de diakses pada 9 Oktober 2017

Sinclair S. P. (2001). Financial exclusion: An introductory survey. *Report of Centre for Research in Socially Inclusive Services*, Heriot-Watt University, Edinburgh.

Tambunan, Tulus. 2015. Financial inclusion, financial education, and financial regulation: a story from Indonesia. *Adbi Working Paper Series* 535. Tokyo: Asian Development Bank Institute. <http://www.adb.org/Publications/Financial-Inclusion-Financial-Education-And-financial-Regulation-Story-Indonesia/> diakses pada 18 oktober 2017.

Van Der Werff, A.D., Hogarth, J.M., Peach, N.D. 2013. A cross country analysis of financial inclusion within the OECD. *Consum. Interest*. Annu. 59, 1-12. www.oecd.org diakses pada 18 oktober 2017.

Wahyudi, S., Tri. 2016. *Konsep dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan Eviws*. Raja Grafindo Persada; Jakarta.

World Bank, 2008. Finance for all: Policies and pitfalls in expanding access. *Policy Research Report*, World Bank Washington DC. www.worldbank.org diakses pada 18 oktober 2017.

World Bank. 2014. *Global Financial Development Report ; Financial Inclusion*. Green Press Initiative, Washington Dc. www.worldbank.org/Financialdevelopment. diakses pada 18 oktober 2017.

Zins, Alexandradan Weill, Laurent. 2016. The determinants of financial inclusion in Africa. *Review of Development Finance*, vol. 6 : 46–57. www.elsevier.com/locate/rdf diakses pada 18 oktober 2017.

DAFTAR GAMBAR

Judul	Hal
Gambar 1.1: Penyebaran Jaringan Kantor BUK di Lima Wilayah Indonesia pada tahun 2016 Tw I	3
Gambar 1.2: Penyebaran Penyaluran Kredit UMKM Berdasarkan Wilayah Di Indonesia Periode 2016	3
Gambar 2.1: Penggunaan dan Akses Terhadap Jasa Keuangan.....	14
Gambar 2.2: Kerangka Pikir Penulisan	36
Gambar 3.1: Alur Perhitungan Indeks Inklusi Keuangan.....	43
Gambar 4.1: Pergerakan PDRB per Kapita Indonesia Dan Volume Belanja Masyarakat Menggunakan Kartu Debet Serta Kartu Kredit Tahun 2012-2015	73
Gambar 4.2: Persentase Kepemilikan Akun Bank Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Indonesia Tahun 2010	76
Gambar 4.3: Proksi Keterjangkauan akses Poin Layanan Lembaga Keuangan Tahun 2016 (persen)	81
Gambar 4.4: Persentase indikator Populasi Dewasa yang menggunakan layanan keuangan berbasis digital di Indonesia tahun 2014-2015	84

DAFTAR TABEL

Judul	Hal
Tabel 2.1: Indikator Keuangan Inklusif yang Digunakan Bank Indonesia.....	18
Tabel 3.1: Perhitungan Indikator Indeks Inklusi Keuangan	40
Tabel 3.2: Definisi Operasional Variabel-Variabel Dalam Penelitian	41
Tabel 4.1: Deskripsi Statistik Data Penelitian	56
Tabel 4.2: Hasil Perhitungan Indikator Indeks Inklusi Keuangan	58
Tabel 4.3: Hasil Perhitungan Indeks Inklusi Keuangan Tingkat Provinsi di Indonesia tahun 2012-2015	60
Tabel 4.4: Hasil Pengujian Pemilihan Model Terbaik	63
Tabel 4.5: Hasil Pengujian Asumsi Klasik	64
Tabel 4.6: Ringkasan Hasil Estimasi Panel Data	66

